



MASTER PLAN SMART CITY

KOTA CIREBON



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan berkah serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga penyusunan Masterplan Smart City Kota Cirebon dapat diselesaikan dengan baik.

Sebuah program dapat terlaksana dengan baik jika direncanakan secara komprehensif. Masterplan Smart City ini sebuah perencanaan program yang telah disusun secara partisipatif dan melibatkan seluruh stakeholder.

Smart City adalah konsep tata kelola kota yang disusun secara cerdas untuk menyelesaikan setiap persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat, melalui pengelolaan sumberdaya dan komunitas yang ada yang diwujudkan dalam strategi penyelesaian masalah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan penciptaan situasi dan kondisi kota yang sejahtera dan nyaman.

Semoga Masterplan Smart City Kota Cirebon ini dapat menjadi panduan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan di Kota Cirebon dengan cerdas sehingga pembangunan di Kota Cirebon dapat terus berjalan dengan baik dan membawa kesejahteraan bagi masyarakatnya.



Drs. NAZRUDIN AZIS, SH
WALIKOTA CIREBON

Cirebon, 10 November 2017



KOMITMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SMART CITY PEMERINTAH KOTA CIREBON DAN DEWAN SMART CITY KOTA CIREBON

Dengan rahmat Allah yang maha kuasa, dengan ini kami menyatakan komitmen untuk melaksanakan pembangunan Smart City di Kota Cirebon, sebagaimana yang tertuang dalam buku I, II, dan III Master Plan Smart City Kota Cirebon, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segenap masyarakat di Kota Cirebon Semoga Allah SWT merestui segala upaya ini.

Walikota Cirebon	Let. Korem 063/SGJ (undur)	DPRD Kota Cirebon	Pengadilan Negeri Kota Cirebon	Kajaksan Negeri Kota Cirebon	Palres Cirebon Kota	Kodim 0614/Kota Cirebon	Pangkalan TNI Angkatan Laut Cirebon	Staf Ahli Wali Kota Bidang Perencanaan dan Pembangunan	Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik
Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	Sekretaris Daerah Kota Cirebon	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	Inspektur Daerah Kota Cirebon	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon	Dinas Perhubungan Kota Cirebon	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon
Dinas Pendidikan Kota Cirebon	Dinas Kesehatan Kota Cirebon	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon	Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon	Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon	Dinas Pengendalian Persiduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon	Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon	Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kota Cirebon	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon	KADIN Kota Cirebon	UNSWAGATI Kota Cirebon	UNTAG Cirebon
STAIN Kota Cirebon	STMIK IKMI Kota Cirebon	STMIK CIC Kota Cirebon	STMIK WIT Kota Cirebon	STTC Kota Cirebon	Acelesia PHRI Kota Cirebon	Bank Indonesia Cirebon	Bank Jabar Banten Cabang Cirebon	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cirebon (TELKOM)	PT. Telekomunikasi Jular Cabang Cirebon (TELUKSEL)
PT. Indosat, Tbk Cabang Cirebon	PT. XL Axiata, Tbk Cabang Cirebon	PT. Hutchison 3 Indonesia Cabang Cirebon (THREE)	PT. Smartfren Telecom, Tbk Cabang Cirebon	PT. Supra Primatama Nusantara Cabang Cirebon (BIENET)	PT. Bina Informatika Solusi (BITSNET)	PT. Mega Mentari Mandiri	PT. Palindo II Cabang Cirebon	PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon	PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon
PT. Multipratama Indahraya (GRAGE)	PT. Karya Bersama Takarob (CSB Mall)	PT. Wahana Multi Media Cirebon (Rader Cirebon)	PT. Berkah Pikiran Rakyat (Kabar Cirebon)	Relawan TIK Cabang Kota Cirebon	RSD Gunung Jati	Fajar Cirebon	Rakyat Cirebon	RW 08 Merbabu Asih	Kecamatan Harjati
Kecamatan Kesambi	Kecamatan Lemahwungkuk	Kecamatan Kajaksan	Kecamatan Paksilpan				SEKIR (DPRD) SUTISNA	POLAIR POLDA BEMAR	AKAP SOLIMIN

Pengene Isun ... Adalah Harapan dan Keinginan Masyarakat Kota Cirebon terhadap Smart City Kota Cirebon yang dituangkan dalam bentuk pesan singkat. Ditulis pada saat Pameran Cirebon Expo tanggal 21 - 24 September 2017



KATA PENGANTAR KETUA TIM PELAKSANA SMART CITY KOTA CIREBON

Alhamdulillah seluruh rangkaian proses penyusunan Masterplan Smart City Kota Cirebon telah selesai. Selama 4 (empat) bulan kami melaksanakan Bimbingan Teknis didampingi oleh Tim Pembimbing dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

Masterplan Smart City Kota Cirebon disusun oleh Tim Pelaksana yang berasal dari seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon sehingga terbentuk sebuah ekosistem Smart City, yaitu keterlibatan seluruh stakeholder baik pemerintah maupun swasta yang bersinergis dan berkolaborasi serta bersepakat bahwa program smart city merupakan gerakan bersama dan berkelanjutan.

Dalam menyusun masterplan ini, Tim Pelaksana Smart City Kota Cirebon tetap memperhatikan kearifan lokal dengan menggunakan istilah dan Bahasa Cirebon dalam nomenklatur program-program Smart City Kota Cirebon dengan harapan seluruh program-program Smart City Kota Cirebon dapat diterima dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan Masterplan Smart City ini, semoga segala upaya kita mendapatkan ridho dari Allah SWT.

Cirebon, 10 November 2017



ARTI LAMBANG

CIREBON KOTA WALI MENUJU SMART CITY BERBASIS KEARIFAN LOKAL :

1. KOTA WALI DICERMINKAN DENGAN 9 CAHAYA (WALISONGO)
2. GAMBAR LAMPU MENGGAMBARAKAN KOTA YANG CERDAS
3. SIMBOL 6 BUAH MENUNJUKAN ELEMEN SMART CITY
4. MOTIF BATIK MEGA MENDUNG (KHAS CIREBON)

MENUNJUKAN KEARIFAN LOKAL

Daftar Isi

KATA PENGANTAR.....	1
KATA PENGANTAR.....	3
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	7
Daftar Tabel.....	8
BAB I Pendahuluan.....	9
1.1. Latar Belakang	9
1.2. Maksud dan Tujuan Masterplan	12
1.3. Landasan Hukum	12
1.4. Kerangka Pikir Smart City	13
BAB II Visi Smart City Kota Cirebon.....	16
2.1. Visi	16
2.2. Misi.....	17
2.3. Tujuan	17
2.4. Strategi atau Kebijakan.....	18
BAB III Strategi Pembangunan Smart City	20
3.1. Smart Governance.....	20
3.1.1. Strategi Pembangunan Smart Governance.....	21
3.1.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Governance.....	23
3.2. Smart Branding	28
3.2.1. Strategi Pembangunan Smart Branding.....	29
3.2.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Branding	30
3.3. Smart Economy.....	32
3.3.1. Strategi Pembangunan Smart Economy.....	33
3.3.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Economy.....	34
3.4. Smart Living.....	36
3.4.1. Strategi Pembangunan Smart Living	37
3.4.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Living	38
3.5. Smart Society	41
3.5.1. Strategi Pembangunan Smart Society	42
3.5.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Society	43

3.6. Smart Environment.....	46
3.6.1. Strategi Pembangunan Smart Environment	47
3.6.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Environment	48
BAB IV Rencana Aksi Smart City Kota Cirebon	50
4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan SmartCity Kota Cirebon	50
4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City	52
4.3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City	53
4.4. Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah	66
BAB V Peta Jalan Pembangunan Smart City Kota Cirebon	68
5.1. Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (Tahun 2017-2018)	68
5.2. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (Tahun 2018-2023)	69
5.3. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang (Tahun 2018-2028)	70
5.4. Pengukuran Keberhasilan Smartcity	71
BAB VI Penutup	75
Lampiran.....	77

Daftar Gambar

Gambar 1 1 <i>Elemen Smart City Readiness</i>	15
Gambar 1 2 <i>Dimensi Smart City</i>	15
Gambar 1 3 <i>Mekanisme kerja pada unit kerja bidang pengembangan aplikasi</i>	64
Gambar 1 4 <i>Mekanisme kerja antar fungsi</i>	64
Gambar 1 5 <i>Model pengukuran</i>	71
Gambar 1 6 <i>Model pengukuran</i>	72
Gambar 1 7 <i>Model pengukuran</i>	73
Gambar 1 8 <i>Model pengukuran</i>	73

Daftar Tabel

Tabel 1 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Governance.....	21
Tabel 2 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Governance dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018.....	23
Tabel 3 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Branding	29
Tabel 4 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Branding dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018	30
Tabel 5 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Economy.....	33
Tabel 6 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Economy dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018	34
Tabel 7 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Living	37
Tabel 8 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Living dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018	38
Tabel 9 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Society	42
Tabel 10 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Society dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018	43
Tabel 11 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Environment	47
Tabel 12 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Environment dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018.....	48
Tabel 13 Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (Tahun 2017-2018)	68
Tabel 14 Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (Tahun 2018-2023)	69
Tabel 15 Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang (Tahun 2018-2028).....	70
Tabel 16 Referensi Tingkat Kematangan Smart City	74

BAB I

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Permasalahan sebuah kota khususnya Kota Cirebon sudah berkembang dan memiliki potensi kompleksitas yang tinggi, sehingga pemecahan masalah secara konvensional kurang tepat dalam mengejar percepatan dan perkembangan sebuah kota. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah salah satu alternatif solusi yang memiliki potensi untuk melakukan perubahan yang sangat cepat sehingga diharapkan dapat menyelesaikan berbagai persoalan dan tantangan sebuah perkotaan.

Saat ini tren revolusi digital telah mengubah pola hidup dari mulai pola kerja, pola bisnis, pola belajar, pola bermain dan sebagainya. Gerd Leonhard menggambarkan bahwa gerakan digitalisasi telah membawa perubahan yang bersifat tidak hanya eksponensial tetapi juga kombinatorial. Mengantarkan manusia ke era dimana perubahan terjadi pada peradaban manusia untuk 20 tahun ke depan dalam mengalahkan perubahan yang pernah terjadi sejak tiga ratus tahun yang lalu.

Salah satu fenomena perubahan yang bisa kita amati adalah terjadinya akselerasi proses urbanisasi di seluruh dunia. Pada tahun 2014, sebuah studi oleh PBB tentang tren urbanisasi dunia menunjukkan bahwa untuk pertama kali dalam sejarah umat manusia, lebih dari setengah populasi manusia (54%) hidup di daerah urban. Sebagai gambaran pada tahun 1950 jumlah populasi urban dunia hanya 30%.

Tren urbanisasi ini akan terus berlanjut dan diperkirakan pada tahun 2050 populasi urban akan mencapai angka 66% dari seluruh populasi dunia. Di Indonesia sendiri populasi urban telah mencapai 53.3% di tahun 2015 (BPS RI)

dan berdasarkan penelitian oleh Citiasia Center for Smart Nation (CCSN) jumlah ini akan meningkat menjadi 68% di tahun 2035.

Digitalisasi juga telah memperluas arti dari urbanisasi itu sendiri. Terminologi urbanisasi lahir pertama kali pada masa revolusi industri, ketika kehidupan berubah dari pola ekonomi pertanian ke pola ekonomi industri (manufaktur). Warga desa berbondong-bondong berpindah ke kota untuk mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja di pabrik-pabrik sebagai kesempatan baru yang muncul terutama akibat ditemukannya konsep mesin uap, mekanisasi, dan elektrifikasi. Pada masa ini batas-batas dimensi fisik sangat jelas terlihat. Hal ini sangat kontras dengan apa yang terjadi pada masa kini, dalam dunia digital batas-batas dimensi fisik begitu samar atau bahkan pada kasus-kasus tertentu batas-batas dimensi fisik ini benar-benar tidak ada. Artinya urbanisasi tidak bisa lagi diejawantahkan sebagai migrasi fisik semata. melainkan juga migrasi gaya hidup dan interaksi socio-cultural masyarakat dari pola-pola bersifat rural ke pola yang bersifat urban.

Masyarakat urban merupakan sebuah sistem kompleks dimana aktor-aktor penyusunnya yaitu manusia, teknologi, dan lingkungan saling terhubung dan mempengaruhi. Lahir dan berkembangnya pusat-pusat masyarakat yang bersifat urban akan selalu menghadirkan tantangan-tantangan baru seperti kemiskinan, kemacetan, kesenjangan sosial, kriminalitas, berkurangnya sumberdaya alam, polusi, masalah kesehatan dan tantangan-tantangan lainnya.

Untuk menyelesaikan tantangan dan persoalan perkotaan tersebut diperlukan strategi dan pendekatan yang komprehensif, inklusif, efektif dan efisien. Pembangunan berbasis Kota Cerdas (Smart City) telah menjadi tren pembangunan kota atau daerah di dunia dan menjadi keniscayaan yang harus diadaptasi daerah atau kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pembangunan Smart City tidak sekedar mengedapankan efisiensi birokrasi dengan memanfaatkan TIK namun juga bagaimana membangun masyarakat dengan menjadikan infrastruktur dan sarana TIK sebagai faktor pendukung atau enabler.

Tren gerakan pembangunan kota atau daerah berbasis Smart City bisa kita saksikan di berbagai belahan dunia seperti Barcelona, Tokyo, London, Berlin, Amsterdam, Melbourne, Seoul, Shanghai, Mumbai, Singapura dan lain-lain. Di setiap kota di berbagai belahan dunia tersebut memiliki kisah sukses pembangunan Smart City yang berbeda-beda sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh setiap kota. Di Korea, sebuah kawasan reklamasi seluas 600 hektar dibangun dari nol sebagai sebuah Smart City, di Dubai menjadikan Masdar sebagai kota yang membangun program kemandirian energi dengan energi surya dan terbarukan serta bertekad menjadi kota yang bebas emisi karbon, Amsterdam fokus pada pembangunan Smart People, Smart Energy, dan Smart Waste Management. Di Singapura, pembangunan Smart City langsung dikendalikan dibawah Prime Minister Office sebagai sebuah program untuk warga, pebisnis, dan pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dengan memanfaatkan teknologi, ide, aplikasi, dan big data.

Namun perlu dipahami bahwa konsep Smart City adalah konsep yang unik dan dinamis. Inisiasi-inisiasi yang muncul sebagai solusi akan permasalahan kota yang satu tidak serta merta bisa diaplikasikan sebagai solusi akan permasalahan yang muncul di kota yang lain. Hal ini terjadi karena Smart City menekankan pentingnya sebuah inovasi untuk menyelesaikan persoalan masing-masing kota dengan memanfaatkan teknologi TIK, sensor, dan data analytic sebagai faktor pendukung untuk mempermudah penyelesaian masalah (enabling factor). Pembangunan berbasis Smart City menyediakan ruang inovasi yang luas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi oleh pemerintah, masyarakat, pelaku bisnis, dunia pendidikan dan berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) lain. Jadi inisiasi Smart City yang muncul bukanlah solusi mutlak yang menutup pintu inovasi dan pengembangan lebih lanjut. Oleh karena itu diperlukan adanya panduan agar pemerintah Kota Cirebon mampu mempersiapkan dan mengimplementasikan konsep Smart City dengan baik sesuai dengan karakter dan potensi yang dimiliki.

1.2. Maksud dan Tujuan Masterplan

Maksud penyusunan masterplan adalah membuat acuan dan pedoman kerja bagi Perangkat Daerah (PD) terkait dalam menyusun perencanaan dan pengembangan Smart City Kota Cirebon.

Adapun tujuan dari penyusunan masterplan ini adalah untuk menyusun perencanaan dan pengembangan Smart City Kota Cirebon yang sistematis, logis, kondisional dan realistis sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Kota Cirebon, sehingga kualitas hidup masyarakat dan Pemerintah Kota Cirebon lebih baik.

1.3. Landasan Hukum

Sebagai landasan hukum dalam pijakan pelaksanaan Smart City di Kota Cirebon adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/M/KOMINFO/11/2007 tentang Pemduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- j. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

- k. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;
- l. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
- m. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
- n. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
- o. Peraturan Walikota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
- p. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.05 / Kep. 262-DKIS/2017 tentang Pembentukan Dewan Cirebon Kota Cerdas (Smart City);
- q. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.05/Kep. 263-DKIS/2017 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Cirebon Kota Cerdas (Smart City);
- r. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.05/Kep. 136-Dishubinkom/2010 tentang Penetapan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Cirebon;
- s. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555/Kep.88-Dishubinkom/2014 tentang Penetapan Surat Elektronik (email) Pemerintah Kota Cirebon pada Domain Resmi Pemerintah Kota Cirebon @cirebonkota.go.id;
- t. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.4/Kep.124-DKIS/2017 tentang Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik pada Pemerintahan Daerah Kota Cirebon; dan
- u. Keputusan Walikota Cirebon Nomor 555.4/Kep.123-DKIS/2017 tentang Pejabat Nama Domain pada Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

1.4. Kerangka Pikir Smart City

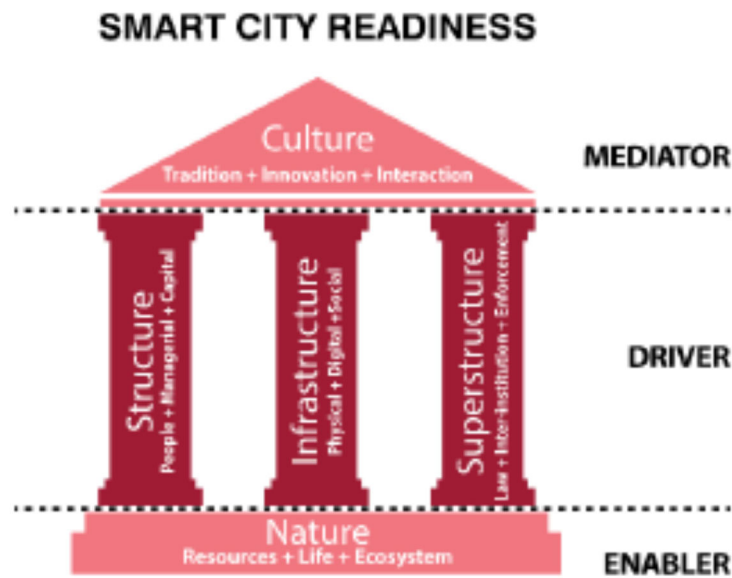
Kerangka pikir (frameworks) Smart City atau Daerah Pintar telah dikembangkan oleh banyak pakar dan akademisi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Beberapa lembaga seperti Smart Cities Council, CISCO, Uni Eropa, dan IEEE telah mengembangkan kerangka pikir terhadap pembangunan Smart City. Selain lembaga-lembaga tersebut terdapat kerangka pikir yang

dikembangkan oleh lembaga think tank dalam negeri dimana kerangka pikir yang dikembangkan tersebut telah disesuaikan dengan konteks Indonesia dan menjadi acuan bagi Panduan Penyusunan Masterplan Smart City ini.

Istilah smart dalam bahasa Indonesia disebut dengan “pintar”, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai “pandai; cakap”, “cerdik; banyak akal”, dan “mahir (melakukan atau mengerjakan sesuatu)” atau “cerdas” yang diartikan sebagai “sempurna perkembangan akal budinya (untuk berpikir, mengerti, dan sebagainya); tajam pikiran” dan “sempurna pertumbuhan tubuhnya (sehat, kuat)”. Kata “Kota Pintar” dipilih untuk menunjukkan pengertian yang lebih luas dari kata cerdas atau “intelligent”. Namun demikian penggunaan kata “Kota Cerdas” juga diperkenankan jika ada daerah yang memilih menggunakan istilah tersebut.

Dalam membangun Smart City, terlebih dahulu suatu kota/kabupaten harus memiliki Kesiapan Daerah Pintar atau Smart City Readiness. Terdapat beberapa elemen utama dalam kesiapan daerah pintar, yaitu potensi alam (nature); struktur daerah (structure); infrastruktur (infrastructure); suprastruktur (superstructure); dan budaya (culture). Untuk keperluan penyusunan Masterplan ini, kajian Smart City Readiness difokuskan kepada 3 elemen saja yaitu Struktur, Infrastruktur, dan Suprastruktur. Ilustrasi elemen kesiapan daerah pintar tersebut dapat dilihat pada Gambar I.1.

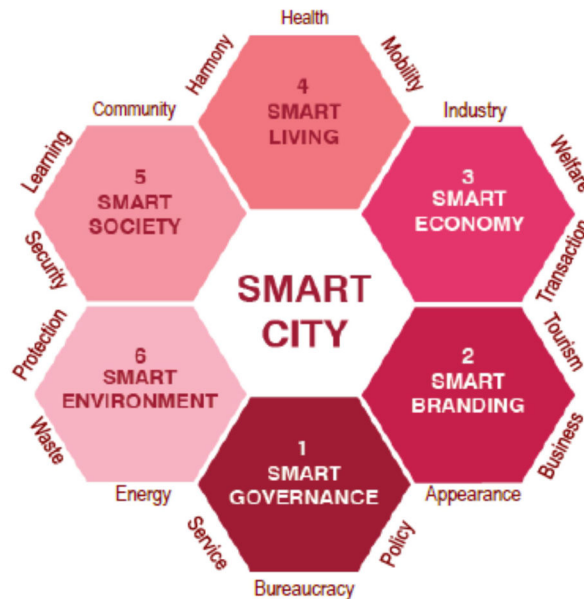
- **Struktur**; pembangunan sumber daya manusia (SDM) pelaksana (*people*) dan penerima manfaat Smart City, penyiapan sumber daya anggaran, dan sumber daya tata kelola dan tata pamong;
- **Infrastruktur**; pembangunan infrastruktur pendukung Smart City yang meliputi infrastruktur fisik, infrastruktur digital atau TIK, dan infrastruktur social untuk kepentingan umum;
- **Suprastruktur**; penyiapan kebijakan atau peraturan daerah, kelembagaan, dan tata-laksana pelaksanaan pembangunan Smart City.



Gambar 1 1 Elemen Smart City Readiness

Sumber : Citiasia Center for Smart Nation

Kerangka pikir berikutnya dari sebuah Smart City adalah dimensi-dimensi yang terdapat di dalam Smart City itu sendiri.



Gambar 1 2 Dimensi Smart City

Sumber : Citiasia Center for Smart Nation

BAB II

Visi Smart City Kota Cirebon

Visi, Misi, Tujuan dan Strategis Smart City Kota Cirebon dilahirkan melalui prinsip penyusunan dan mekanisme yang jelas. Prinsip yang digunakan dalam penyusunan Visi adalah SMART, Spesific (S) artinya visi memiliki sasaran harus jelas, Measurable (M) artinya bahwa sasaran tersebut harus terukur, Aggressive (A) artinya visi harus memiliki kesesuaian dengan perubahan atau tuntutan perkembangan jaman, Realistics (R) artinya bahwa visi tersebut harus memiliki nilai realistis / mungkin dicapai dan Timebound (T) artinya visi harus memiliki tujuan dalam kurun waktu tertentu. Selain prinsip yang digunakan dalam penyusunan visi smart city, dilibatkan pula unsur unsur pemangku kepentingan dengan cara mengundang unsur organisasi perangkat daerah, unsur masyarakat, unsur akademisi dan juga unsur komunitas dalam merumuskannya.

2.1. Visi

"Terwujudnya Cirebon Kota Cerdas yang Kreatif , Inovatif, Sinergis dan Berdaya Saing pada tahun 2028".

Penjabaran visi tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- Kreatif** : Kreatif adalah suatu kemampuan berpikir ataupun melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencari pemecahan sebuah kondisi ataupun permasalahan secara cerdas, berbeda (out of the box), tidak umum, orisinil, serta membawa hasil yang tepat dan bermanfaat.
- Inovatif** : Inovatif yaitu usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya.

Sinergis : Sinergis adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Berdaya Saing : Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal.

2.2. Misi

1. Mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif;
2. Meningkatkan daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
3. Mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat;
4. Mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien;
5. Mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis; dan
6. Mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

2.3. Tujuan

1. Terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif;
2. Meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional;
3. Terwujudnya ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat;

4. Terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien;
5. Terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis; dan
6. Terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan.

2.4. Strategi atau Kebijakan

Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan kesatu : **terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif** adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas layanan publik;
- 2) Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi; dan
- 3) Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan.

Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan kedua : **meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional** adalah :

- 1) Membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (Tourism branding);
- 2) Membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis daerah (Business branding); dan
- 3) Membangun dan memasarkan wajah kota (City appearance branding).

Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan ketiga : **terwujudnya ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat** adalah

- 1) Membangun ekosistem industri yang berdaya saing;
- 2) Mewujudkan kesejahteraan rakyat; dan
- 3) Membangun ekosistem transaksi keuangan.

Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan keempat : **terwujudnya lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien** adalah

- 1) Harmonisasi tata ruang wilayah;
- 2) Meyediakan prasarana kesehatan yang berkualitas; dan
- 3) Menyediakan transportasi publik yang nyaman.

Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan kelima : **terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis** adalah

- 1) Mewujudkan interaksi masyarakat yang efisien (community);
- 2) Membangun ekosistem belajar yang efisien (education); dan
- 3) Mewujudkan sistem keamanan masyarakat (security).

Strategi atau kebijakan untuk mencapai tujuan keenam : **terwujudnya tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan** adalah

- 1) Melindungi ekosistem penting dan mengembalikan kawasan lahan kritis;
- 2) Mengelola limbah dan sampah; dan
- 3) Penghematan energi.

BAB III

Strategi Pembangunan Smart City

3.1. Smart Governance

Smart Governance dapat diartikan sebagai tata kelola kota yang pintar, dimana komponen tata kelola ini umumnya menyoroti tata kelola dari Pemerintah Daerah sebagai institusi yang mengendalikan sendi-sendi kehidupan kota. Sehingga *Smart Governance* di dalam dimensi Smart City merupakan gambaran dari tata kelola pemerintahan yang dilaksanakan secara pintar, yaitu tata kelola pemerintahan yang mampu mengubah pola-pola tradisional dalam birokrasi sehingga menghasilkan *business process* yang lebih cepat, efektif, efisien, komunikatif dan selalu melakukan perbaikan.

Sasaran dari *Smart Governance* adalah terwujudnya tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.

Tentu saja dalam melakukan perubahan pola-pola tradisional dalam tata kelola pemerintahan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, namun adopsi teknologi adalah hal yang akan memberikan percepatan terhadap perubahan tersebut. *Smart Governance* harus dapat diimplementasikan ke dalam tiga unsur dalam tata kelola, yaitu pelayanan (*service*), birokrasi (*bureaucracy*), dan kebijakan (*policy*).

Tujuan dari *Smart Governance* adalah mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan komunikatif. Untuk mencapai tujuan tersebut maka beberapa program yang akan direncanakan adalah sebagai berikut :

3.1.1. Strategi Pembangunan Smart Governance

Tabel 1 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Governance

Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja sama	Time line
Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Terlaksananya layanan administrasi kelurahan secara online (CIREBON SEDULUR)	Jumlah layanan administrasi kelurahan secara online	1,8 M	ABPD Kota	DSPPPA Kecamatan DKIS	Relawan TIK Akademisi	Jangka Pendek
	Optimalnya layanan perijinan online dan terpadu (PTSP-Online)	Jumlah layanan perijinan online dan terpadu (PTSP online)	150 jt	APBD Kota	DPMPSTP	Kemenkeu BKPM	Jangka Pendek
	Terselenggaranya layanan administrasi kependudukan (CIREBON BROJOL AJA KALLEN)	Jumlah layanan administrasi kependudukan (Cirebon Brojol aja Kallen)	300 jt	APBD Kota	DISDUKCAP IL	RS/RB Bidan Swasta Fasilitas Kesehatan	Jangka Pendek
	Adanya mekanisme penanganan keluhan masyarakat dan memberikan respon dalam waktu yang singkat dan kepuasan yang baik (LAPOR)		100 jt	APBD Kota	DKIS	KSP Setneg Ombudsm an	Jangka Pendek
Program Peningkatan Efisiensi Manajemen Birokrasi	Terbangunnya layanan eGovernment yang terintegrasi, disertai dengan pengembangan Enterprise Service Bus untuk interoperabilitas serta satu portal layanan informasi publik kota (PORTAL SATIN CIREBON PASTI WERU)	Persentase layanan e-government yang terintegrasi secara Enterprise	1,46 M	APBD Kota Cirebon	DKIS	Kemenko minfo	Jangka Pendek
	Tersedianya Executive Information System (EIS) , Geographical Information System (GIS) dan Decision Support System (DSS)	Jumlah EIS, GIS dan DSS	500 jt	APBD Kota Cirebon	DKIS DPUPR	BIG	Jangka Pendek
	Terbangun dan terkelolanya Command Center	Persentase permasalahan yg dapat dikendalikan oleh CC	10 M	APBD Kota APBD Provinsi	DKIS		Jangka Pendek

Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja sama	Time line
	Terkelolanya data pembangunan dalam Sistem CIREBON SATU DATA yang memenuhi kaidah keterbukaan informasi publik		760 jt	APBD Kota Cirebon	DKIS	BPS	1 Tahun
	Terlaksananya administrasi kepegawaian dan evaluasi kinerja terintegrasi (CIREBON SEGA JAMBLANG)	Persentase peningkatan kinerja pegawai	150 jt	APBD Kota Cirebon	BKPPD	Kemendagri	Jangka Pendek
	Terselenggaranya Paper-less administrasi perkantoran (e-Office)		100 jt	ABPD Kota Cirebon	DKIS	Kemenko minfo	Jangka Pendek
Program Peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan	Tersedianya layanan informasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan (CIREBON JEJ)	Jumlah layanan informasi peraturan perundang undangan per tahun	150 jt	APBD Kota Cirebon	Setda – Bag. Hukum DKIS		Jangka Pendek
	Tersedianya mekanisme partisipasi dan konsultasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (LAPOR)	Persentase tingkat keberhasilan partisipasi dan konsultasi publik	150 jt	APBD Kota Cirebon	DKIS	KSP Setneg Ombudsm an	Jangka Pendek
	Dilaksanakannya perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terbuka (eMusrenbang), serta didukung saluran aspirasi (eAspirasi) dan pemantauan pembangunan (eMonitoring) berbasis teknologi informasi dan komunikasi	Jumlah layanan aplikasi perencanaan pembangunan	100 jt	APBD Kota Cirebon	BP4D DKIS	Masyaraka t	Jangka Pendek

3.1.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Governance

Tabel 2 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Governance dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
USULAN PROGRAM BARU										
Program Peningkatan Kualitas Layanan Publik	2.7.17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan	Meningkatkan Kualitas layanan publik	Meningkatnya kulaitas layanan publik	Terlaksananya layanan administrasi kelurahan secara online (CIREBON SEDULUR)	1,8 M	ABPD Kota	DSPPPA	Relawan TIK	2 Tahun
	2.7.17	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Kelurahan/Kecamatan						Kecamatan	Akademisi	
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi						DKIS		
	2.12.17 2.10.24	Program Penataan dan Pelayanan Perijinan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			Optimalnya layanan perijinan online dan terpadu (PTSP-Online)	150 jt	APBD Kota	DPMPSTSP / DKIS	Kemenkeu BKPM	1 Tahun
	2.16.17	Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan			Terselenggaranya layanan administrasi kependudukan	300 jt	APBD Kota	DISDUKCA PIL	RS/RB	1 Tahun

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			(CIREBON BROJOL AJA KLALEN)				Bidan Swasta Fasilitas Kesehatan	
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			Adanya mekanisme penanganan keluhan masyarakat dan memberikan respon dalam waktu yang singkat dan kepuasan yang baik (LAPOR)	100 jt	APBD Kota	DKIS	KSP Setneg Ombudsm an	1 Tahun
Program Peningkatan Efisiensi Manajemen Birokrasi	2.10.22	Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi	Meningkatkan efisiensi manajemen birokrasi	Meningkatnya efisiensi manajemen birokrasi	Terbangunnya layanan eGovernment yang terintegrasi, disertai dengan pengembangan Enterprise Service Bus untuk interoperabilitas serta satu portal layanan informasi publik kota (PORTAL SATIN CIREBON PASTI WERU)	1,46 M	APBD Kota Cirebon	DKIS	Kemenko minfo	2 Tahun
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi								

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			Tersedianya Executive Information System (EIS) yang	500 jt	APBD Kota Cirebon	DKIS	BIG	1 Tahun
	1.3.21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			terintegrasi dengan Geographical Information System (GIS) dan Decision Support System (DSS)			DPUPR		
	2.10.22	Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi			Terbangun dan terkelolanya Command Center	10 M	APBD Kota	DKIS		1 Tahun
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi					APBD Provinsi			
	2.10.22	Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi			Terkelolanya data pembangunan dalam Sistem CIREBON SATU DATA yang memenuhi kaidah keterbukaan informasi publik	760 jt	APBD Kota Cirebon	DKIS	BPS	1 Tahun
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi								
	4.5.16	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur			Terlaksananya administrasi kepegawaian dan evaluasi kinerja terintegrasi (CIREBON SEGA JAMBLANG)	150 jt	APBD Kota Cirebon	BKPPD	Kemendagri	1 Tahun

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			Terselenggaranya Paper-less administrasi perkantoran (e-Office)	100 jt	ABPD Kota Cirebon	DKIS	Kemenko minfo	1 Tahun
Program Peningkatan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan	4.1.19	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Meningkatkan partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan	Meningkatnya partisipasi publik dalam penyusunan kebijakan dan arah pembangunan	Tersedianya layanan informasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan (CIREBON JEH)	150 jt	APBD Kota Cirebon	Setda – Bag. Hukum DKIS		1 Tahun
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi								
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			Tersedianya mekanisme partisipasi dan konsultasi publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi (LAPOR)	150 jt	APBD Kota Cirebon	DKIS	KSP Setneg Ombudsm an	1 Tahun
	4.3.15	Program Pengembangan Data/Informasi			Dilaksanakannya perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terbuka (eMusrenbang), serta didukung saluran aspirasi (eAspirasi) dan pemantauan	100 jt	APBD Kota Cirebon	BP4D DKIS	Masyarak at	2 Tahun
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi								

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
					pembangunan (eMonitoring) berbasis teknologi informasi dan komunikasi					

3.2. Smart Branding

Dimensi kedua dalam Smart City adalah *Smart Branding*, yaitu branding daerah yang pintar. Yang dimaksud dengan *Smart Branding* adalah inovasi dalam memasarkan daerahnya sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dengan mengembangkan tiga elemen, yaitu pariwisata, bisnis, dan wajah kota. Sasaran dari *Smart Branding* adalah adanya peningkatan daya saing daerah dengan penataan wajah kota dan pemasaran potensi daerah baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Smart Branding memiliki tujuan meningkatnya daya saing daerah dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional. Adapun program untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya adalah :

3.2.1. Strategi Pembangunan Smart Branding

Tabel 3 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Branding

Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Time line
Program Pembangunan Dan Pemasaran Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	Tersedianya Rencana Induk Pariwisata Kota Cirebon	Persentase keberhasilan Rencana Induk Pariwisata	100 jt	APBD Kota Cirebon	BP4D DKOKP	Provinsi Jabar Kemenpar	Jangka Pendek
	Tersedianya Program WISTAKON (Wisata Kota Cirebon) Pembangunan dan Pemasaran wajah kota	Persentase keberhasilan pemasaran kota Cirebon	500 jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP DKIS DPKUMKM	Kemenpar Bekraf	Jangka Pendek
	Terwujudnya Pemberdayaan Sanggar Seni.	Persentase pertumbuhan sanggar seni	500 jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP DPUPR		Jangka Pendek
	Terwujudnya Penumbuhan Kelompok Sadar Wisata	Persentase pertumbuhan kelompok sadar wisata	100 jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP	Kemenpar	Jangka Pendek
	Terbentuknya Duta Wisata Kota Cirebon	Jumlah pertumbuhan duta wisata	300 jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP	Kemenpar	Jangka Pendek
Program Pembangunan Platform Dan Pemasaran Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	Terevitalisasikannya Citra Niaga	Persentase revitalisasi Citra Niaga	2 M	APBD Kota Cirebon	DPMPSTSP DPKUMKM	OJK Perbankan	Jangka Pendek
	Terwujudnya Branding Kota Cirebon	Persentase keberhasilan branding kota Cirebon	500 jt	APBD Kota Cirebon	BP4D DKIS	Komunitas	Jangka Pendek
Program Pembangunan dan Pemasaran wajah kota (City appearance branding)	Tersedianya Landmark Kota Cirebon yang RAMAH	Persentase tingkat pertumbuhan Landmark Kota Cirebon yang RAMAH	0	CSR	Setda DPUPR	Komunitas	Jangka Pendek

3.2.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Branding

Tabel 4 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Branding dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
USULAN PROGRAM BARU										
Program Pembangunan Dan Pemasaran Ekosistem Pariwisata (Tourism Branding)	4.3.16	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Mewujudkan pembangunan dan pemasaran Ekosistem Pariwisata	Terwujudnya Pembangunan Dan Pemasaran Ekosistem Pariwisata	Tersedianya Rencana Induk Pariwisata Kota Cirebon	100 jt	APBD Kota Cirebon	BP4D	Provinsi Jabar Kemenpar	Jangka Pendek
	3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata						DKOKP		
	3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Tersedianya Program WISTAKON (Wisata Kota Cirebon) Pembangunan dan Pemasaran wajah kota	500 Jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP	Kemenpar	Jangka Pendek
	2.10.2 4	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi						DKIS	Bekraf	
	3.6.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						DPKUMKM		
	2.16.1 6	Program Pengelolaan Keragaman Budaya			Terwujudnya Pemberdayaan Sanggar Seni.	500 jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP		Jangka Pendek
	1.3.19	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung						DPUPR		
	3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Terwujudnya Peningkatan Kelompok Sadar	100 jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP	Kemenpar	Jangka Pendek

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
					Wisata					
	3.2.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata			Terbentuknya Duta Wisata Kota Cirebon	300 jt	APBD Kota Cirebon	DKOKP	Kemenpar	Jangka Pendek
Program Pembangunan Platform Dan Pemasaran Ekosistem Bisnis Daerah (Business Branding)	2.12.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Mewujudkan Pembangunan Platform Dan Pemasaran Ekosistem Bisnis Daerah	Terwujudnya Pembangunan Platform Dan Pemasaran Ekosistem Bisnis Daerah	Terevitalisasi kannya Citra Niaga	2 M	APBD Kota Cirebon	DPMPTSP	OJK	Jangka Pendek
	3.6.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor						DPKUMKM	Perbankan	
	2.10.16	Program Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi			Terwujudnya Branding Kota Cirebon	500 jt	APBD Kota Cirebon	BP4D DKIS	Komunitas	Jangka Pendek
Program Pembangunan dan Pemasaran wajah kota (City appearance branding)			Mewujudkan Pembangunan dan Pemasaran wajah kota	Terwujudnya Pembangunan dan Pemasaran wajah kota	Tersedianya Landmark Kota Cirebon yang RAMAH	0	CSR	Setda DPUPR	Komunitas	Jangka Menengah

3.3. Smart Economy

Dimensi ketiga dalam Smart City adalah *Smart Economy* atau tata kelola perekonomian yang pintar. *Smart Economy* dalam dalam Smart City dimaksudkan untuk mewujudkan ekosistem perekonomian di daerah yang mampu memenuhi tantangan di era informasi yang disruptif dan menuntut tingkat adaptasi yang cepat seperti saat ini.

Sasaran dari dimensi *Smart Economy* di dalam Smart City adalah terwujudnya ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di era informasi saat ini, serta meningkatkan *financial literacy* masyarakat melalui berbagai program diantaranya mewujudkan *less-cash society*. Sasaran tersebut diwujudkan dengan mengembangkan tiga elemen dalam *Smart Economy*, yaitu ekosistem industri, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan ekosistem transaksi keuangan.

Smart Economy bertujuan untuk mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat, melalui program sebagai berikut :

3.3.1. Strategi Pembangunan Smart Economy

Tabel 5 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Economy

Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja sama	Time line
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terbangunnya sistem informasi lowongan pekerjaan	Persentase keberhasilan peningkatan kesejahteraan	200 jt	APBD Kota APBD Prov	Disnaker DKIS		Jangka Pendek
Program Pembangunan Ekosistem Transaksi Keuangan	Terbangunnya Sentra UMKM	Jumlah sentra UMKM	100 jt	APBD Kota APBD Prov	Disperindag DKIS		Jangka Pendek

3.3.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Economy

Tabel 6 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Economy dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
USULAN PROGRAM BARU										
Program Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	2.1.17	Program Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Tercapainya Peningkatan Kesejahteraan Rakyat	Terbangunnya sistem informasi lowongan pekerjaan	200 jt	APBD Kota	Disnaker		Jangka Pendek
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi					APBD Prov	DKIS		
Program Pembangunan Ekosistem Transaksi Keuangan	2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Mewujudkan Pembangunan Ekosistem Transaksi Keuangan	Tersedianya Sentra UMKM	Terbangunnya Sentra UMKM	5 M	APBD Kota	Disperindag	OJK, Perbankan	Jangka Menengah
	1.3.19	Program Penyelenggaraan Bangunan Gedung					APBD Prov dan APBN	DPUPR		
	2.11.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		Tercapainya UMKM Go Online	Terbangunnya UMKM Go Online	100 jt	APBD Kota	Disperindag		Jangka Pendek
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem					APBD Prov	DKIS		

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
		Informasi								

3.4. Smart Living

Smart Living menjadi salah satu dimensi dalam Smart City untuk menjamin kelayakan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Kelayakan taraf hidup ini dapat dinilai dari tiga elemen, yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang di dalam sebuah Smart City.

Smart Living memiliki tujuan mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak tinggal, nyaman dan efisien, melalui program sebagai berikut :

3.4.1. Strategi Pembangunan Smart Living

Tabel 7 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Living

Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Time line
Program Harmonisasi Tata Ruang	Terbangunnya Sistem Penataan Ruang partisipatif dan Online	Persentase tingkat efesiensi penataa ruang partisipatif	500 jt	APBD Kota APBD Prov APBN	DPUPR DPRKP		Jangka Menengah
Program Penyediaan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas	Tersedianya CIREBON LENGKO (Layanan Elektronik Kesehatan Online) : Sistem pelayanan antrian Online berbasis Android	Persentase tingkat efektifitas layanan elektronik kesehatan	200 jt	APBD Kota BLUD	DINKES, RSD GJ	BPJS	Jangka Pendek
	Terbangunnya Sistem Kunjungan Kesehatan Warga	Persentase tingkat efektifitas sistem kunjungan kesehatan warga	200 jt	APBD Kota APBN	DINKES		Jangka Pendek
	Terbangunnya Sistem Informasi Ketersediaan Ruang Rawat Inap di RS Gn Jati	Persentase tingkat efesiensi ketersediaan ruang rawat inap	200 jt	APBD Kota BLUD	RSD GJ		Jangka Pendek
	Tersedianya Layanan Mandiri Rawat Jalan untuk Peserta BPJS di RSUD GN Jati	Persentase tingkat efesiensi layanan mandiri rawat jalan	250 jt	APBD Kota BLUD CSR	RSD GJ	BPJS, DKIS	Jangka Pendek
	Tersediannya Layanan e-Puskesmas	Persentase tingkat efektifitas layanan puskesmas	200 jt	APBD Kota CSR	DINKES	TELKOM	Jangka Pendek
Program Penyediaan Transportasi Publik Yang Nyaman	Tersediannya Sistem ATCS	Presentase penurunan kemacetan lalu lintas	2 M	APBD Kota APBD Prov APBN	DISHUB DKIS		Jangka Menengah
	Tersediannya Pengelolaan Smart Parking	Persentase tingkat efesiensi pengelolaan parkir	500 jt	APBD Kota APBD Prov APBN CSR	DISHUB BKD	Bank Persepsi	Jangka Pendek
	Terbangunnya e-Trasnpotation	Persentase tingkat efektifitas sarana transportasi	200 jt	APBD Kota APBD Prov APBN CSR	DISHUB		Jangka Menengah
	Tersedianya transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman hingga ke seluruh wilayah kota	Persentase tingkat efektifitas sarana transportasi	5 M	APBD Kota APBD Prov APBN CSR	Dishub		Jangka Menengah

3.4.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Living

Tabel 8 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Living dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
USULAN PROGRAM BARU										
Program Harmonisasi Tata Ruang	1.3.21	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Mewujudkan Harmonisasi Tata Ruang	Terwujudnya Harmonisasi Tata Ruang	Terbangunnya Sistem Penataan Ruang partisipatif dan Online	500 jt	APBD Kota	DPUPR		Jangka Menengah
	1.4.15	Program Penyelenggaraan Prasarana Sarana Umum Perumahan					APBD Prov APBN	DPRKP		
Program Penyediaan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas	1.2.21 atau 1.2.30	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan	Meningkatkan Prasarana Kesehatan Yang Berkualitas	Tersedianya Sistem informasi antrian secara online	Tersedianya CIREBON LENGKO (Layanan Elektronik Kesehatan Online) : Sistem pelayanan antrian Online berbasis Android	200 jt	APBD Kota BLUD	DINKES, RSD GJ	BPJS	Jangka Pendek

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
	1.2.21 atau 1.2.30	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan		Tersedia nya Sistem Kunjungan Kesehatan Warga	Terbangunnya Sistem Kunjungan Kesehatan Warga	200 jt	APBD Kota APBN	DINKES		Jangka Pendek
	1.2.21	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Tersedianya Sistem Informasi	Terbangunnya Sistem Informasi	200 jt	APBD Kota	RSD GJ		Jangka Pendek
	atau 1.2.30	Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan		Ketersediaan Ruang Rawat Inap di RS Gn Jati	Ketersediaan Ruang Rawat Inap di RS Gn Jati		BLUD			Jangka Pendek
	1.2.21 atau 1.2.30	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan		Terwujudnya Layanan Mandiri Rawat Jalan untuk Peserta BPJS di RSUD GN Jati	Tersedianya Layanan Mandiri Rawat Jalan untuk Peserta BPJS di RSUD GN Jati	250 jt	APBD Kota BLUD CSR	RSD GJ	BPJS, DKIS	Jangka Pendek
	1.2.21 atau 1.2.30	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan		Terwujudnya Layanan e-Puskesmas	Tersediannya Layanan e-Puskesmas	200 jt	APBD Kota CSR	DINKES	TELKOM	Jangka Pendek
Program Penyediaan Transportasi Publik	2.9.18	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Mewujudkan Transportasi Publik Yang	Terciptanya Transportasi Publik Yang	Tersediannya Sistem ATCS	2 M	APBD Kota	DISHUB		Jangka Menengah

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
Yang Nyaman	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi	Nyaman	Nyaman			APBD Prov APBN	DKIS		
	2.9.21 4.4.16	Program Peningkatan Pelayanan Parkir Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah		Terwujudnya Pengelolaan Smart Parking	Tersediannya Pengelolaan Smart Parking	500 jt	APBD Kota APBD Prov APBN CSR	DISHUB BKD	Bank Persepsi	Jangka Pendek
	2.9.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas		Terwujudnya e-Transportation	Terbangunnya e-Transportation	200 jt	APBD Kota	DISHUB		Jangka Menengah
	atau 2.9.18	Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas					APBD Prov APBN CSR			
	2.9.15 atau 2.9.18	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Terciptanya transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman hingga ke seluruh wilayah kota	Tersedianya transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman hingga ke seluruh wilayah kota	5 M	APBD Kota APBD Prov APBN CSR	Dishub		Jangka Menengah

3.5. Smart Society

Smart Society sebagai bagian dari Smart City merupakan dimensi yang banyak membahas tentang manusia sebagai unsur utama sebuah kota. Di dalam sebuah Smart City, interaksi antar manusia telah bergerak menuju ekosistem sosio-teknis di mana dimensi fisik dan virtual dari kehidupan warga kota semakin terjalin secara intensif. Interaksi antar-warga terjalin dengan semakin kuat dan tanpa sekat dengan mediasi teknologi.

Sasaran dari *Smart Society* dalam Smart City adalah terwujudnya ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan *digital literacy* yang tinggi. Sasaran dari *Smart Society* tersebut diwujudkan dengan pengembangan tiga elemen di dalam *Smart Society*, yaitu komunitas warga (*community*), ekosistem pembelajaran (*learning*), dan sistem keamanan (*security*).

Smart Society bertujuan mewujudkan ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, melalui program sebagai berikut :

3.5.1. Strategi Pembangunan Smart Society

Tabel 9 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Society

Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Time line
Program Pembangunan Interaksi Masyarakat Yang Efisien	Tersedianya layanan interaksi digital warga (LAPOR)	Persentase tingkat efisiensi terhadap Interaksi Masyarakat	150jt	APBD	DKIS, Perangkat Daerah	Sekretariat	Jangka Pendek
	Tersedianya e-musrenbang	Persentase terakomodirnya usulan masyarakat	500jt	APBD, PP	DKIS, BP4D, PD	Provider	Jangka Menengah
Program Pembangunan Ekosistem Belajar Yang Efisien	Terselenggaranya digital literasi yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal	Persentase tingkat angka partisipasi kasar (APK) pendidikan	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	Terbangunya e-library yang terintegrasi	Jumlah pembelajar yang mengakses sistem e-library	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	Tersedianya buku digital	Jumlah buku digital yang dapat diproduksi dan diakses oleh pembelajar	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	Tersediannya PPDB Online	Persentase tingkat keamanan sistem dan objektifitas sistem	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	Tersediannya e-Schooling	Persentase tingkat efisiensi dan penjaminan mutu penyelenggaraan e-schooling	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
Program Pembangunan Sistem Keamanan Masyarakat	Tersedianya Sistem Panic Button yang fast-respon	Persentase tingkat efisiensi dan efektifitas terhadap sistem keamanan	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	Tersedianya CCTV di setiap sudut kota	Persentase tingkat efisiensi dan efektifitas terhadap sistem keamanan	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DISDIK DKIS	Kementerian, Provider	Jangka Panjang

3.5.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Society

Tabel 10 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Society dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
USULAN PROGRAM BARU										
Program Pembangunan Interaksi Masyarakat Yang Efisien	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatkan tpartisipasi dan interaksi masyarakat dalam pembangunan	Meningkatnya Partisipasi dan interaksi masyarakat dalam pembangunan	Tersedianya layanan interaksi digital warga (LAPOR)	150jt	APBD	DKIS PD	Sekretariat	Jangka Pendek
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			Tersedianya e-musrenbang	500jt	APBD, PP	DKIS BP4D PD	Provider	Jangka Menengah
	4.3.15	Program Pengembangan Data/Informasi Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
Program Pembangunan Ekosistem Belajar Yang Efisien	1.1.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Meningkatkan kualitas pendidikan berbasis TIK	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Berbasis TIK	Terselenggaranya digital literasi yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal	300jt	APBD, PPP	DISDIK	Provider	Jangka Pendek
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi						DKIS		
	1.1.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Terbangunya e-library yang terintegrasi	300jt	APBD, PPP	DISDIK	Provider	Jangka Pendek
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi						DKIS		
	1.1.20 2.10.24	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi			Tersedianya buku digital	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	1.1.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Tersediannya PPDB Online	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi								

Program Kerja	Kodrek	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
	1.1.20	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan			Tersediannya e-Schooling	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
	2.10.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi								
Program Pembangunan Sistem Keamanan Masyarakat			Mewujudkan sistem keamanan masyarakat	Terwujudnya Sistem Keamanan Masyarakat	Tersedianya Sistem Panic Button yang fast-respon	300jt	APBD, PPP	DISDIK DKIS	Provider	Jangka Pendek
					Tersedianya CCTV disetiap sudut kota	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DISDIK DKIS	Kementrian, Provider	Jangka Panjang

3.6. Smart Environment

Dimensi keenam dalam sebuah Smart City adalah pengelolaan lingkungan yang pintar, dimana yang dimaksud dengan pintar adalah adanya perhatian bagi lingkungan hidup dalam pembangunan kota yang sama besarnya dengan perhatian yang diberikan terhadap pembangunan infrastruktur fisik maupun pembangunan bagi sarana dan prasarana bagi warga. Ide dasar dari *Smart Environment* di dalam Smart City adalah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, dimana hal tersebut tidak boleh hilang dengan lahirnya ide tentang Smart City yang menjadikan elemen teknologi sebagai elemen pendorongnya.

Tujuan *Smart Environment* adalah mewujudkan tata kelola lingkungan hidup yang baik dan berkelanjutan, melalui program sebagai berikut :

3.6.1. Strategi Pembangunan Smart Environment

Tabel 11 Strategi Pembangunan Smart City pada Elemen Smart Environment

Program	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerjasama	Time line
Program Perlindungan Ekosistem Penting Dan Mengembalikan Kawasan Lahan Kritis	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau terpadu dan ramah anak	Persentase tingkat kenyamanan masyarakat	1 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DLH, DSPPPA	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Menengah
	Terbangunnya perluasan hutan kota	Persentase tingkat perluasan hutan kota	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DLH, DPUPR	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Panjang
	Terlaksananya restorasi kawasan kritis dan sungai bersama warga (pesisir pantai)	Persentase tingkat keberhasilan restorasi kawasan kritis dan sungai	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DLH, DPUPR	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Panjang
	Terbangunnya sistem drainase integrative	Persentase tingkat keberhasilan sistem drainase	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DPUPR	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Panjang
Program Pengelolaan Limbah dan Sampah	Terbangunnya Sistem Informasi Bank Sampah	Persentase tingkat ekonomis sistem informasi bank sampah	500 jt	APBD	DKIS, DLH	LSM	Jangka Pendek
	Terbentuknya Gerakan RW Ramah Lingkungan	Persentase tingkat keberhasilan gerakan ramah lingkungan	300jt	APBD, PPP	DLH	LSM	Jangka Menengah
Program Penghematan Energi	Terbangunnya PJU Terintegrasi melalui Smart PJU	Persentase tingkat efesiensi energy listrik	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DISHUB, PUPR,	PLN	Jangka Menengah

3.6.2. Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Environment

Tabel 12 Sinkronisasi Program dan Kegiatan Smart Environment dengan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2013 – 2018

Program Kerja	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
USULAN PROGRAM BARU									
Program Perlindungan Ekosistem Penting Dan Mengembalikan Kawasan Lahan Kritis	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Meningkatkan perlindungan ekosistem penting dan kawasan lahan kritis	Meningkatnya perlindungan ekosistem penting dan kawasan lahan kritis	Tersedianya Ruang Terbuka Hijau terpadu dan ramah anak	1 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, CSR, PPP	DLH, DSPPPA, DPRP	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Menengah
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam			Terbangunnya perluasan hutan kota	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DLH, DPUPR, DPRP	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Panjang
	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir Laut			Terlaksananya restorasi kawasan kritis dan sungai bersama warga (pesisir pantai)	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, CSR, PPP	DLH, DPUPR	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Panjang

Program Kerja	Sinkronisasi Program	Tujuan	Sasaran	Indikator Keberhasilan	Usulan Anggaran	Sumber Pembiayaan	Pelaksana	Kerja Sama	Timeline
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase			Terbangunnya sistem drainase integratif	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DPUPR	LSM, Provider, Kementerian	Jangka Panjang
Program Pengelolaan Limbah dan Sampah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Meningkatkan pengelolaan limbah dan sampah	Meningkatnya pengelolaan limbah dan sampah	Terbangunnya Sistem Informasi Bank Sampah	500 jt	APBD	DKIS, DLH	LSM	Jangka Pendek
	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup			Terbentuknya Gerakan RW Ramah Lingkungan	300jt	APBD, CSR, PPP	DLH, DPRP, DSPPA	LSM	Jangka Menengah
	Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat								
Program Penghematan Energi	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Tercapinya penghematan energi	Terpenuhinya efisiensi energi	Terbangunnya PJU Terintegrasi melalui Smart PJU	5 M	APBD, APBD Provinsi, APBN, PPP	DISHUB, DPUPR,	PLN	Jangka Menengah

BAB IV

Rencana Aksi Smart City Kota Cirebon

4.1. Pengembangan Kebijakan dan Kelembagaan SmartCity Kota Cirebon

Secara garis besar, pembahasan mengenai spesifikasi tata kelola Smart City dibagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi pengelola dan tata kelola.

a) Arahan Umum Manajemen Smart City

Arahan umum yang terkait dengan Aspek Keorganisasian dalam Tata Kelola Smart City adalah sebagai berikut:

1. Kepemimpinan

Fungsi utama yang harus ada terkait kepemimpinan dalam bidang smart city adalah:

- Memimpin Organisasi Pengelola, yakni mengkoordinasi perencanaan, realisasi, operasional harian, dan evaluasi internal.
- Melakukan komunikasi dan kerja sama dengan seluruh stakeholder yang menjadi pengguna layanan Smart City.

2. Hubungan yang sinergis

Untuk memastikan hubungan sinergis antar stakeholder, sebaiknya membentuk Dewan Smart City. Dewan ini berfungsi untuk:

- Mewadahi kepentingan stakeholder
- Mengkoordinasikan perencanaan dan operasional inisiatif-inisiatif smart city yang bersifat strategis.

b) Kerangka Organisasi Tata Kelola Smart City

Sesuai dengan prinsip pemisahan antara governance dan manajemen, maka usulan organisasi tata kelola smart city adalah sebagai berikut:

1. Fungsi Governance

Dilakukan oleh 3 pihak :

- Wali Kota selaku pemegang amanat untuk pengelolaan Kota Cirebon (eksekutif)
- DPRD selaku wakil rakyat dan pemegang kekuasaan legislatif
- Dewan Smart City sebagai forum komunikasi dan antar stakeholder Smart City untuk dapat saling berkontribusi dalam kemajuan Kota Cirebon
- Tim Pelaksana Smart City yang akan mengawal implementasi smart city di Kota Cirebon

2. Fungsi Manajemen

Dilakukan oleh pengelola layanan yang dapat dilakukan oleh beberapa pihak, Perangkat Daerah terkait di Pemerintah Daerah Kota Cirebon maupun pihak lain (stakeholder).

c) Manajemen SDM

Untuk menjawab tantangan kebutuhan dan kondisi SDM di Kota Cirebon, dapat diterapkan prinsip Pemilahan Tugas. Prinsip pemilahan tugas harus dilakukan pada kondisi keterbatasan SDM pada organisasi pengelola TI, yakni dengan tujuan untuk:

1. Mendapatkan kinerja yang optimal;
2. Menghindari kemungkinan bertumpuknya tanggung-jawab beberapa fungsi kritis TI pada seorang personel; dan

3. Mengurangi peluang terjadinya penyalahgunaan aset sistem informasi.

Model pemilahan tugas menjadi acuan dalam audit teknologi informasi berbasis Control Objectives for Information and Related Technologies/COBIT. Dalam matriks fungsi tersebut ada beberapa bagian yang ditandai dengan warna merah dan/atau tanda 'x'. Warna merah dan/atau tanda 'x' menunjukkan tugas/fungsi yang seharusnya dipilah atau dipisahkan. Sedangkan warna hijau menandakan fungsi kerja yang dapat dirangkap oleh seorang SDM TI. Sebagai contoh: (1) Fungsi kerja Quality Assurance seharusnya dipisahkan dari fungsi kerja System Analyst atau Programmer dan (2) Helpdesk dapat merangkap sebagai Operator Komputer.

4.2. Rencana Pembangunan Infrastruktur Pendukung Smart City

- a) Penyediaan jaringan backbone menggunakan Fiber Optic yang menjangkau seluruh Perangkat Daerah dan jaringan distribusi layanan masyarakat sampai dengan tingkat Kelurahan/Puskesmas/Sekolah/RW.
- b) Pengembangan dan pengelolaan Data Center (DC) dan Disaster Recovery Center (DRC) yang handal untuk menjamin availability dan peningkatan keamanan sistem informasi.
- c) Penyediaan Sarana Command Center sebagai pendukung pengambilan keputusan, penugasan, pengkoordinasian, monitoring dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi, meliputi : tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihan, langkah pengadaan, dan langkah penyediaan informasi publik.

4.3. Rencana Pengembangan Aplikasi dan Perangkat Lunak Pendukung Smart City

a) Arsitektur Server Aplikasi dan Database

Faktor penentu pengembangan suatu arsitektur server adalah sebagai berikut :

1. High availability

Ketersediaan (availability) suatu perangkat server ditentukan oleh :

- High levels of service availability

Tingkat ketersediaan suatu server dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan komponen-komponennya seperti : operating system, processor, memory, bus, DAS storage, expansion slots, dan lain-lain.

- Increased reliability

Tingkat reliabilitas server juga dipengaruhi reliabilitas komponen-komponennya.

2. Security

Ancaman serangan terhadap infrastruktur nasional dapat berupa secara fisik dan non fisik. Infrastruktur nasional yang rentan terhadap serangan dapat disebut dengan critical infrastructure (infrastruktur kritis). Serangan keamanan sistem informasi yang bersifat tidak langsung, seperti; virus, worms, malware dan lain sebagainya dalam wujud kode-kode perangkat lunak yang disampaikan melalui jaringan internet nasional terhadap infrastruktur nasional akan berdampak seperti serangan keamanan secara fisik. Hal ini disebabkan oleh karena informasi merupakan asset yang sangat berharga bagi pemerintahan sebuah Negara.

Untuk mengantisipasi adanya serangan keamanan sistem informasi, perlu ditingkatkan kesadaran akan keamanan informasi dan

juga dibutuhkan adanya tata kelola keamanan sistem informasi yang baik di tingkat nasional. Tanpa adanya kesadaran dan tata kelola keamanan sistem informasi yang tepat sangat sulit bagi sebuah negara untuk mengantisipasi serangan-serangan keamanan informasi nasional. Organisasi dan tata kelola ini adalah sebagai wujud kepemimpinan yang akan memiliki peran penting untuk melakukan koordinasi antar lembaga terkait. Dalam organisasi tersebut, harus diisi oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dari berbagai bidang khususnya kemampuan teknis dibidang keamanan informasi dan juga kemampuan manajerial serta kepemimpinan (leadership) yang baik.

Perlu adanya suatu proses dan manajemen yang mengatur Keamanan Informasi. Prosedur dan pengelolaan yang efektif untuk menjaga keamanan informasi. Keamanan informasi membutuhkan pengelolaan terhadap nilai aset informasi, serta kerentanannya terhadap adanya berbagai ancaman. Pengelolaan aset informasi terhadap ancaman dan kerentanannya lazim disebut manajemen resiko. Metode manajemen resiko sebagai berikut:

- a. Metode Pengurangan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan ancaman/kerentanan tinggi tetapi dampaknya rendah.
- b. Metode Penerimaan Risiko – metode ini dilakukan ketika kemungkinan ancaman/kerentanan rendah dan dampaknya kecil atau dapat diterima.
- c. Metode Pemindahan Risiko – Jika risiko sangat tinggi atau organisasi tidak mampu mempersiapkan kendali yang diperlukan, risiko dapat dipindahkan keluar dari organisasi.
- d. Metode Penghindaran Risiko – Jika ancaman dan kerentanan sangat mungkin terjadi dan dampaknya juga sangat tinggi, lebih baik menghindari risiko dengan misalnya melakukan alih daya perangkat pemrosesan data dan juga staf.

Risiko keamanan informasi berbanding lurus dengan nilai aset informasi, ancaman dan kerentanan. Jadi, risiko dapat meningkat atau berkurang dengan cara memanipulasi besar atau kecilnya ancaman dan kerentanan yang mempengaruhi nilai aset informasi. Hal ini dapat dilakukan dengan manajemen risiko.

Saat ini di Indonesia sudah menerapkan standard keamanan informasi yang mengadopsi ISO 27001 untuk menilai (assess) tingkat kematangan keamanan sistem informasi yang diterapkan pada instansi pemerintah. Standar yang diadopsi tersebut mengintegrasikan ISO 27001 dengan CMMI. Penilaian standar keamanan informasi ini diimplementasikan dalam Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI).

Penerapan ISO 27001 harus dapat segera diterapkan di Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Jangka Pendek (Tahun 2017/2018).

3. Scalability

Kemampuan scalability suatu perangkat server ditentukan oleh :

- Flexibility to cope with changing demands

Suatu server harus mampu mengatasi perubahan kebutuhan layanan server, seperti mampu melakukan skalabilitas terhadap peningkatan layanan akses data pada server.

4. Manageability

Kemampuan (manageability) suatu perangkat server ditentukan oleh :

- Complete management solutions

Server harus memiliki solusi end-to-end manajemen yang terintegrasi yang bekerja secara holistik (menyeluruh) sesuai kebutuhan.

- Solution-wide service level agreements (SLAs)

Server mampu dikelola untuk beragam kebutuhan SLA.

- Service delivery strategies

Server mampu dikelola berdasarkan strategi output services yang dikehendaki oleh aplikasi-aplikasi yang menggunakannya.

5. Consolidation/Virtualization

Suatu perangkat server yang baik dapat menyediakan tingkat konsolidasi dan/atau virtualisasi yang bisa ditentukan oleh :

- Virtualization software support

Server harus memiliki software yang mendukung consolidation dan virtualization seperti operating system, tools, dan utilities.

- Resources abstraction level

Server harus mendukung abstraksi penggunaan sumber daya server (seperti CPU power, memory, dll) untuk kebutuhan dari sistem operasi, services dan aplikasi pada saat yang bersamaan.

6. Affordability

Kemampuan affordability (ketercapaian) suatu perangkat server ditentukan oleh:

- Consolidated server and other assets

Server dan beragam aset teknologi (seperti storage, network, dan lain-lain) dari beragam lokasi geografis harus mampu terkonsolidasi menjadi server dan aset yang lebih sedikit secara fisik dan logik.

- Controlled total cost of ownership (TCO)

Seluruh aspek biaya dalam penyelenggaraan server harus terkendali, seperti (biaya akuisisi, lisensi HW dan SW, training, konsultasi, dan lain-lain).

Arsitektur server aplikasi dimungkinkan (bukan pilihan yang selalu harus dilakukan) untuk menggunakan teknologi virtualisasi karena banyak

aplikasi yang utilitasnya rendah dan secara fisik lebih mudah mengelolanya, tetapi secara logika setiap aplikasi tetap terpisah. Virtualisasi server dapat memberikan beberapa benefit sebagai berikut :

- Kemudahan proses backup & restore.

Mesin virtual dijalankan dalam bentuk image. Proses backup, maintenance dan restore dapat dilakukan dengan membuat salinan image atau melakukan copy-paste image.

- Penghematan Investasi Hardware

Satu server fisik dapat menampung beberapa server virtual.

- Pengurangan Biaya Maintenance

Semakin sedikit server fisik yang ditangani tentu akan mengurangi jumlah biaya maintenance server. Server-server fisik yang lebih sedikit akan mengurangi jumlah dan beban pemakaian listrik, AC dan personil. Selain itu, jumlah space yang harus disediakan untuk menampung server fisik pun berkurang.

- Peningkatan Reliabilitas.

Server-server fisik yang sudah ada dapat dikurangi dan dijadikan sebagai cadangan/ server backup sehingga skala reliabilitas dapat dicapai tanpa harus melakukan investasi tambahan

- Peningkatan Perlindungan Sistem.

Proses virtualisasi memudahkan proses scan melalui sistem induk atau mengambil pilihan lain bisa dengan mudah mengganti sistem yang tercemar dengan sistem baru yang masih bersih.

- Standarisasi.

Virtualisasi memudahkan proses standarisasi sistem karena server virtual tidak memerlukan driver untuk berbagai tipe hardware yang berbeda. Driver disediakan dengan melakukan emulasi hardware milik

host/server sehingga mesin virtual yang ada dapat dengan mudah dikloning menjadi server baru.

Untuk aplikasi yang utilitasnya tinggi, database dan perlu kehandalan yang tinggi, virtualisasi dapat dihindari. Untuk aplikasi-aplikasi baru yang dikembangkan, diutamakan untuk menggunakan virtualisasi pada server yang telah ada (dengan tetap memperhatikan spesifikasi kebutuhan aplikasi).

Arsitektur database menggunakan DBMS yang pada umumnya digunakan untuk implementasi database dalam berbagai aplikasi. Arsitektur ini ditekankan untuk :

- Menghindari digunakannya penyimpanan data tanpa DBMS (misalnya textfile)
- Kemudahan migrasi sistem database

Berikut ini adalah pedoman untuk implementasi database :

- Skema partisi harus mengikuti aturan sebagai berikut:
 - Master Database
 - Tempdb Database harus diletakkan pada partisi yang berbeda karena menampung temporary user objects seperti tables, stored procedures, variables, dan cursors. Juga berisi work tables, versi dari the tables untuk keperluan snapshot, dan temporary sorted rowsets ketika rebuilding indexes. Total size Tempdb ini akan mempengaruhi kinerja database
 - Backup Database dibuat terpisah dari lokasi Master Database
 - Dalam melakukan fragmentasi data harus memenuhi beberapa kondisi agar proses fragmen tersebut benar, diantaranya:
 - Completeness, sebuah unit data yang masih dalam bagian dari relasi utama, maka data harus berada dalam satu fragmen. Ketika ada relasi, pembagian datanya harus menjadi satu kesatuan dengan relasinya.

- Reconstruction, sebuah relasi asli dapat dibuat kembali atau digabungkan kembali dari sebuah fragmen. Ketika telah dipecah-pecah, data masih memungkinkan untuk digabungkan kembali dengan tidak mengubah struktur data.
- Disjointness, data didalam fragmen tidak boleh diikuti dalam fragmen lain agar tidak terjadi redundancy data, kecuali untuk atribut primary key dalam fragmentasi vertikal.
- Aturan untuk pelaksanaan fragmentasi:
 - Fragmen dibentuk dari predikat yang telah dipilih dan diasosiasikan dengan transaksi yang terdapat dalam database. Predikat secara spesifik mencantumkan nilai atribut yang digunakan dalam format conjunctive (AND) dan disjunctive (OR) yang digunakan untuk memilih command, dan kolom (record) yang berisi nilai yang sama dengan format fragment.
 - Fragment harus terpisah dan gabungan dari fragment-fragment tersebut harus terdiri atas keseluruhan fragment. Fragment yang mendahului akan menjadi lebih sulit untuk dianalisis dan diimplementasikan.
 - Fragment yang terbesar adalah keseluruhan tabel, fragment terkecil merupakan sebuah record. Fragment harus didesain sedemikian rupa untuk memelihara keseimbangan diantara perbedaan ini.
- Fragmentasi data dapat diselesaikan melalui beberapa cara, antara lain fragmentasi horizontal, fragmentasi vertikal, dan fragmentasi campuran (mixed atau hybrid):
 - Fragmentasi Horizontal terdiri dari tuple dari fragment global yang kemudian dipecah-pecah atau disekat menjadi beberapa sub-sets. Penyekatan tipe ini sangat berguna didalam database terdistribusi, dimana setiap sub-sets dapat berisi data yang memiliki properti secara umum. Fragmentasi horizontal didefinisikan menurut sebuah kondisi atau predikat yang menyatakan bahwa tuple yang ada telah mencukupi.

- Fragmentasi Vertikal akan membagi lagi atribut-atribut dari fragment global yang tersedia menjadi beberapa grup. Bentuk yang paling simple dari fragmentasi vertical adalah dekomposisi, dimana sebuah row-id yang unik dapat disertakan dalam setiap fragment untuk menjamin dan memungkinkan terjadinya proses rekonstruksi melalui sebuah operasi join. Dengan kata lain bahwa fragmentasi jenis ini akan membagi sebuah data menjadi beberapa tabel yang atributnya saling terkait.
- Fragmentasi hybrid atau mixed merupakan penggabungan dari penggunaan kedua proses fragmentasi data yang telah disebutkan sebelumnya
 - Setiap fragment dapat diletakkan pada partisi yang berbeda
- Clustering database dilakukan dengan pembagian fungsi sebagai berikut:
 - Database master digunakan untuk transaksional.
 - Database slave hanya digunakan untuk warehouse / analysis / query.
 - Pemisahan data transaksional dan data untuk warehouse berguna untuk membedakan letak data yang akan disimpan di storage. Pada data transaksional, data dapat diletakkan pada storage berkecepatan tinggi sedangkan untuk warehouse bisa menggunakan yang spesifikasinya lebih rendah.
- Database bukanlah file biasa yang mudah dicopy, disnapshot dan dibackup. Proses yang biasa dilakukan adalah proses dump, replikasi dan restore.
- Opsi high availability untuk database server menjadi salah satu syarat untuk pengembangan dan pemilihan produk database ke depannya.

Untuk keamanan dan juga untuk meningkatkan availability / ketersediaan data maka perlu dilakukan backup secara rutin. Tape hasil backup data selain disimpan di lokasi on-site, juga harus disimpan di lokasi off-site. Penyimpanan, penggunaan dan kebutuhan media tape

harus memperhatikan masa retensi (jangka waktu sebuah tapebackup disimpan dan masih dapat digunakan untuk melakukan restore) dari tape backup sebagai berikut:

<i>Frekuensi Retensi Backup</i>	<i>Masa Retensi</i>
Backup harian	4 minggu
Backup mingguan	4 minggu
Backup bulanan	1 tahun
Backup tahunan	3 tahun

Terdapat beberapa metoda rotasi media diantaranya yang paling sering digunakan adalah metoda Grandfather-Father-Son dimana:

- Backup harian (Son) dilakukan setiap hari
- Backup harian yang diambil pada hari terakhir dari setiap minggu menjadi backup mingguan (Father)
- Backup mingguan yang diambil pada hari terakhir dari setiap bulan menjadi backup bulanan (Grandfather)
- Pada akhir tahun, backup bulanan yang diambil pada hari terakhir dari setiap tahun menjadi backup tahunan.

Media backup dapat dihapus dengan memperhatikan tabel retensi media backup pada tabel di atas sehingga dapat digunakan kembali untuk keperluan backup selanjutnya. Namun demikian biasanya tape backup bulanan dan tahunan tetap dipertahankan dan tidak digunakan dalam rotasi media. Dengan metoda ini diharapkan media backup (tape) di lokasi offsite yang digunakan untuk rotasi tidak digunakan kembali (reuse) sampai penggantinya telah dikirim ke lokasi offsite. Sebagai contoh, media backup (tape) untuk minggu pertama tidak boleh dikembalikan lagi ke DC dari lokasi off-site (DRC) sampai backup bulanan benar-benar aman tersimpan di lokasi off-site.

b) Big Data

Ledakan data yang besar di era informasi sekarang ini memunculkan apa yang dinamakan big data. BIG DATA didefinisikan sebagai sebuah masalah domain dimana teknologi tradisional seperti relasional database tidak mampu lagi untuk melayani. Pada dasarnya big data memiliki 3 karakteristik yaitu :

1. Volume

Volume data yang besar pada big data ini meningkat seiring dengan berkembangnya teknologi internet. Jutaan orang memproduksi data video yang ada di youtube, status di facebook, foto di instagram dll. Banyaknya data yang di produksi telah menghasilkan begitu besar volume data yang tersimpan secara format digital di internet.

2. Velocity

Volume data yang banyak tersebut bertambah dengan kecepatan yang begitu cepat sehingga sulit bagi kita untuk mengelola hal tersebut.

3. Variety

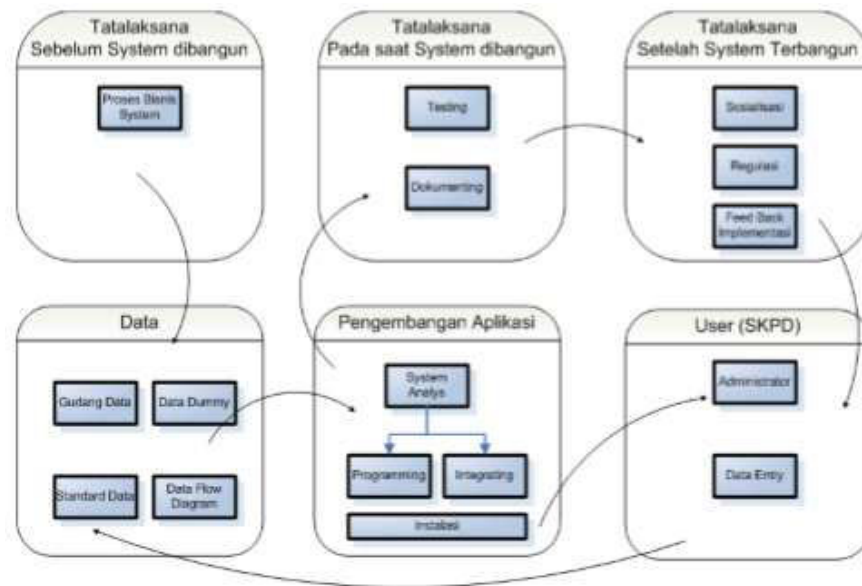
Data yang begitu banyak dan cepat tersebut memiliki jenis yang bermacam-macam. Ada teks, gambar, video, foto, animasi, dan lebih banyak lagi jenis data yang lain.

Big data mengarah pada data tak terstruktur yang mewakili hampir 80% hingga 90% dari semua data yang dikumpulkan, dengan pertumbuhan jumlah data tak terstruktur lebih cepat 10-50 kali dibandingkan data yang terstruktur (volume). Data diibaratkan sebagai bahan mentah di mana industri-industri tertentu melakukan pemaksimalan keberadaannya. Namun sayang, banyaknya data yang mengalir banyak yang akhirnya 'terbuang'. Hal ini dialami di level velocity. Kemudian tantangan yang dihadapi di level variety salah satunya adalah banyaknya variasi dari data yang ada di mana mencakup teks, dokumen, image, video, dan lain-lain.

Sebagai gambaran, sekumpulan akun Facebook memuat informasi perorangan, seperti nama, alamat email, nomor telepon, teman-teman, foto dan lainnya. Dari alamat email yang digunakan, dapat dihubungkan aktifitas dunia maya perorangan di akun-akun aplikasi jejaring sosial lainnya, seperti Twitter, LinkedIn, Kaskus dan sebagainya. Dari nomor telepon di akun Facebook dapat dicari informasi tentang orang tersebut dari penyedia layanan telepon, seperti penggunaan telepon, nomor-nomor yang dihubungi, alamat, nomor KTP atau passport, NPWP dan sebagainya. Dari foto-foto dapat diperoleh informasi lokasi yang pernah dikunjungi orang tersebut, dan daftar teman-teman serta aktifitas Wall di Facebook akan menghasilkan data tentang perilaku sosial orang tersebut. Selanjutnya, dari nomor KTP atau NPWP dapat diperoleh informasi finansial, bank, pola belanja dan seterusnya. Gabungan semua data ini, baik yang tersedia di Facebook, Twitter, penyedia layanan telepon, bank, dan seterusnya, adalah kumpulan data multi-facet tentang individu terkait yang dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Kumpulan data ini selalu berkembang, berubah dan bervariasi setiap saat. Inilah bentuk Big Data dalam kehidupan sehari-hari. Yang menarik di sini adalah: perkembangan, perubahan dan variasi tersebut terjadi dengan sendirinya secara alami. Dalam ilustrasi di atas, pengguna Facebook secara sadar dan sukarela menyerahkan informasi penting tentang dirinya pada pihak lain dari waktu ke waktu. Dengan kata lain, Big Data telah melampaui kapasitas survei dan studi tradisional, bila ditinjau dari segi cakupan dan terbaru informasi.

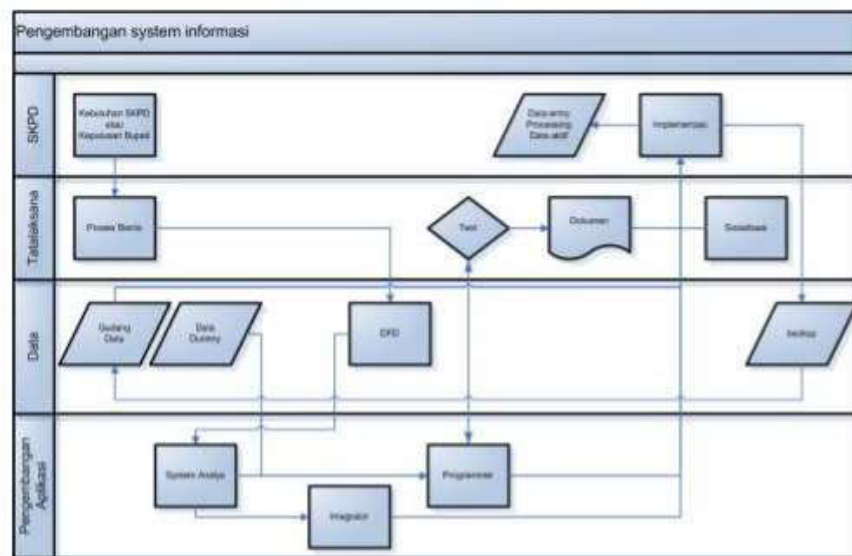
Beberapa prinsip dari big data adalah tidak membuang data apapun karena residu tersebut mungkin akan menjadi penting sejalannya waktu. Berikutnya, real-time processing. Sedangkan untuk menghadapi variasi data yang tinggi, big data menciptakan struktur melalui ekstraksi, transformasi, tanpa harus membuang data mentah yang dimiliki.

c) Mekanisme Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi



Gambar 1 3 Mekanisme kerja pada unit kerja bidang pengembangan aplikasi

Sumber : Masterplan e-Government Kota Cirebon 2016-2020



Gambar 1 4 Mekanisme kerja antar fungsi

Sumber : Masterplan e-Government Kota Cirebon 2016-2020

Pengembangan sistem dimulai dengan pemetaan proses bisnis, dilaksanakan oleh staf seksi ekosistem e-Government:

1. Dokumen proses bisnis diubah dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD)/UML/metodologi design lainnya oleh staf seksi Data, karena seksi ini yang mengetahui pemetaan data milik pemerintah kota.

2. Dokumen design diserahkan ke seksi pengembangan aplikasi untuk dibuat programmingnya, penetapan bahasa pemrograman ditentukan berdasarkan format data yang ada serta kapasitas transaksi pada modul aplikasi ini serta kemudahan dalam integrasi nantinya.
3. System Analyst memberikan perencanaan test ke seksi ekosistem e-Government untuk melakukan pengujian, setiap tahapan kemajuan harus mendapatkan persetujuan dari seksi tatalaksana dengan melakukan test hasil processing
4. Setiap tahapan yang telah disetujui oleh staf tester maka dibuat dokumentasi teknisnya
5. Staf tatalaksana juga membuat buku petunjuk penggunaan (manual book) atas sistem yang sedang dibangun
6. Setelah tahap pemrograman selesai maka dilakukan integrasi dengan sistem lain oleh team integrator
7. Selama pelaksanaan pembangunan data yang digunakan adalah data dummy yang telah disiapkan oleh seksi Data
8. Setelah seluruh sistem siap dan mendapat persetujuan dari seksi tatalaksana, maka seksi tatalaksana membuat kegiatan sosialisasi, SOP pemanfaatannya, serta regulasinya. Sedangkan seksi pengembangan aplikasi dan data melakukan instalasi ke SKPD pengguna serta melakukan backup ke data center .
9. Masa implementasi adalah 6 bulan sejak instalasi, dan selama itu, seksi pengembangan aplikasi, data dan ekosistem e-Government terus menerus melakukan perbaikan yang diperlukan untuk kesempurnaan sistem tersebut.
10. Data adalah milik SKPD sesuai tupoksinya. Pelaksanaan data entry dilakukan oleh SKPD pengguna, proses dan data / informasi hasil proses disimpan dan dimiliki oleh SKPD pengguna, semua data / informasi wajib di backup di data center . Seksi data dan pengelola data center dilarang melakukan perubahan data, apabila ada usulan

perubahan data maka hal itu hanya bisa dilakukan oleh SKPD pengguna.

11. Format standar meta data hanya bisa dilakukan setelah ada kesepakatan tertulis antara seksi data dengan SKPD pengguna / pemilik sistem.
12. Penyusunan data dummy untuk pengembangan aplikasi, harus sepengetahuan SKPD pemilik data.
13. Pemanfaatan data yang tersimpan di data center hanya bisa dilakukan setelah mendapatkan ijin tertulis dari SKPD pengguna.
14. Pengendalian software proprietary dilakukan oleh staf seksi pengembangan aplikasi
15. Pengendalian Tata Kelola TIK dilaksanakan oleh seksi tata kelola
16. Pengendalian aset maya / aset informasi pemerintah kota, kebijakan pengamanan data serta standar meta data dilakukan oleh seksi data dan seksi keamanan informasi.

4.4. Rencana Penguatan Literasi Smart City Daerah

Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan mengkomunikasikan konten dari piranti digital secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti akademik, karir dan kehidupan sehari-hari.

Dalam kaitannya dengan Cirebon Smart City, literasi Smart City dapat dikatakan merupakan pengetahuan dan pemahaman akan konsep Smart City yang perlu disampaikan kepada masyarakat, agar masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan konsep Cirebon Smart City secara efektif dan efisien. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kota Cirebon bekerja sama dengan akademisi, dunia usaha dan para Relawan Teknologi Informasi dan Komunikasi (RTIK) Kota Cirebon akan mengadakan kegiatan penguatan literasi dalam bentuk sosialisasi untuk memperkenalkan konsep smart city, serta mengajarkan bagaimana menggunakan dan

memanfaatkan konsep smart city terutama aplikasi layanan publik, sehingga warga Kota Cirebon dapat memahami betul apa itu Smart City, sehingga setiap warga Kota Cirebon dapat belajar, berpartisipasi dalam pembangunan kota dengan konsep smart city.

Selanjutnya sosialisasi smart city juga, akan berhasil jika dimasukkan sebagai kegunaan dalam bentuk pelayanan untuk masyarakat. Pelayanan secara baik dan cepat melalui konsep smart city akan membawa smart city masuk ke tengah masyarakat dan akan diterima oleh masyarakat secara wajar dan pada akhirnya bisa bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat.

BAB V

Peta Jalan Pembangunan Smart City Kota Cirebon

5.1. Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (Tahun 2017-2018)

Tabel 13 Rencana Program Pembangunan Jangka Pendek (Tahun 2017-2018)

No	Program/Kegiatan	2017	2018
I	SMART GOVERNANCE		
1	Layanan administrasi kelurahan secara online (CIREBON SEDULUR)	√	√
2	Optimalisasi Layanan perijinan online dan terpadu (PTSP-Online)		√
3	Layanan administrasi kependudukan (CIREBON BROJOL AJA KLALEN)	√	
4	Penanganan keluhan masyarakat dan memberikan respon dalam waktu yang singkat dan kepuasan yang baik (LAPOR)	√	
5	Layanan eGovernment yang terintegrasi, disertai dengan pengembangan Enterprise Service Bus untuk interoperabilitas serta satu portal layanan informasi publik kota (PORTAL SATIN CIREBON PASTI WERU)	√	√
6	Executive Information System (EIS) yang terintegrasi dengan Geographical Information System (GIS) dan Decision Support System (DSS)		√
7	Pembangunan dan Pengelolaan Command Center		√
8	Pengelolaan data pembangunan dalam Sistem CIREBON SATU DATA yang memenuhi kaidah keterbukaan informasi publik	√	√
9	Pembangunan administrasi kepegawaian dan evaluasi kinerja terintegrasi (CIREBON SEGA JAMBLANG)	√	√
10	Penyelenggaraan Paper-less administrasi perkantoran (e-Office)	√	√
11	Pembangunan Portal layanan informasi peraturan perundang-undangan dan kebijakan (CIREBON JEH)	√	
12	Pelaksanaan perencanaan pembangunan secara partisipatif dan terbuka (eMusrenbang), serta didukung saluran aspirasi (eAspirasi) dan pemantauan pembangunan (eMonitoring) berbasis teknologi informasi dan komunikasi	√	√
II	SMART BRANDING		
13	Penyusunan Rencana Induk Pariwisata Kota Cirebon	√	
14	Pembangunan Program WISTAKON (Wisata Kota Cirebon) Pembangunan dan Pemasaran wajah kota		√
15	Pemberdayaan Sanggar Seni		√
16	Penumbuhan Kelompok Sadar Wisata		√
17	Pembentukan Duta Wisata Kota Cirebon		√

No	Program/Kegiatan	2017	2018
18	Revitalisasi Citra Niaga		√
19	Branding Kota Cirebon		√
III SMART ECONOMY			
20	Pembangunan sistem informasi lowongan pekerjaan		√
21	Pembangunan UMKM Go Online		√
IV SMART LIVING			
22	Pembangunan CIREBON LENGKO (Layanan Elektronik Kesehatan Online) : Sistem pelayanan antrian Online berbasis Android	√	
23	Pembangunan Sistem Kunjungan Kesehatan Warga		√
24	Pembangunan Sistem Informasi Ketersediaan Ruang Rawat Inap di RS Gn Jati	√	
25	Pembangunan Layanan Mandiri Rawat Jalan untuk Peserta BPJS di RSUD GN Jati	√	
26	Layanan e-Puskesmas	√	√
V SMART SOCIETY			
27	Penyelenggaraan digital literasi yang terintegrasi dengan lembaga pendidikan formal		√
28	Pembangunan e-library yang terintegrasi		√
29	Penyediaan buku digital		√
30	Penyelenggaraan PPDB Online	√	√
31	Pembangunan e-Schooling		√
32	Pembangunan Sistem Panic Button yang fast-respon		√
VI SMART ENVIRONMENT			
33	Pembangunan Sistem Informasi Bank Sampah	√	√
34	Penyediaan CCTV disetiap sudut kota	√	√

5.2. Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (Tahun 2018-2023)

Tabel 14 Rencana Program Pembangunan Jangka Menengah (Tahun 2018-2023)

No	Program/Kegiatan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I SMART GOVERNANCE							
1	Pengembangan e-musrenbang	√	√	√	√	√	√
II SMART BRANDING							
2	Pembangunan Landmark Kota Cirebon yang RAMAH	√	√	√	√	√	√
III SMART ECONOMY							
3	Pembangunan Sentra UMKM	√	√	√			

IV	SMART LIVING						
4	Pengembangan Sistem ATCS	√	√	√			
5	Pembangunan dan Pengelolaan Smart Parking		√	√	√		
6	Pembangunan e-Transportation	√	√	√	√	√	√
7	Penyediaan transportasi publik yang terintegrasi dan nyaman hingga ke seluruh wilayah kota	√	√	√	√	√	√
VI	SMART ENVIRONMENT						
8	Pembangunan Sistem Penataan Ruang partisipatif dan Online	√	√	√	√	√	√
9	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau terpadu dan ramah anak	√	√	√	√	√	√
10	Pembentukan Gerakan RW Ramah Lingkungan	√	√	√			
11	Pembangunan PJU Terintegrasi melalui Smart PJU	√	√	√			
12	Penyediaan CCTV disetiap sudut kota	√	√	√	√	√	√

5.3. Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang (Tahun 2018-2028)

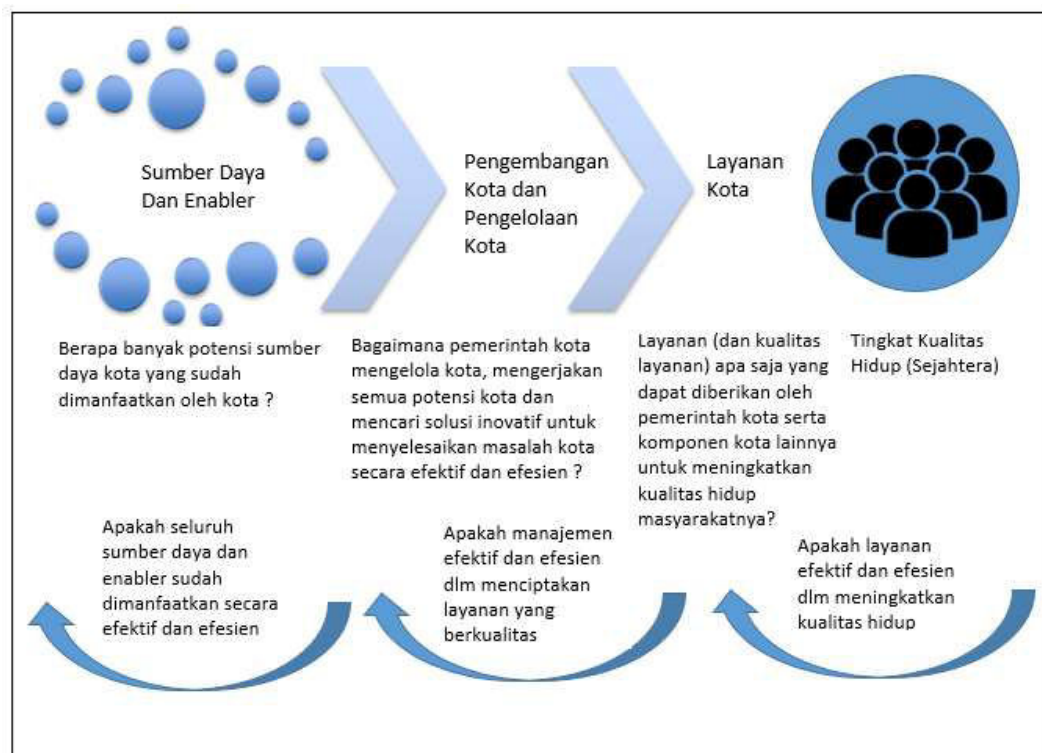
Tabel 15 Rencana Program Pembangunan Jangka Panjang (Tahun 2018-2028)

No	Program/Kegiatan	2023	2024	2025	2026	2027	2028
VI	SMART ENVIRONMENT						
1	Penyediaan CCTV disetiap sudut kota	√	√	√	√	√	√
2	Pembangunan perluasan hutan kota	√	√	√	√	√	√
3	Penyelenggaraan restorasi kawasan kritis dan sungai bersama warga (pesisir pantai)	√	√	√	√	√	√
4	Pembangunan sistem drainase integratif	√	√	√	√	√	√

5.4. Pengukuran Keberhasilan Smartcity

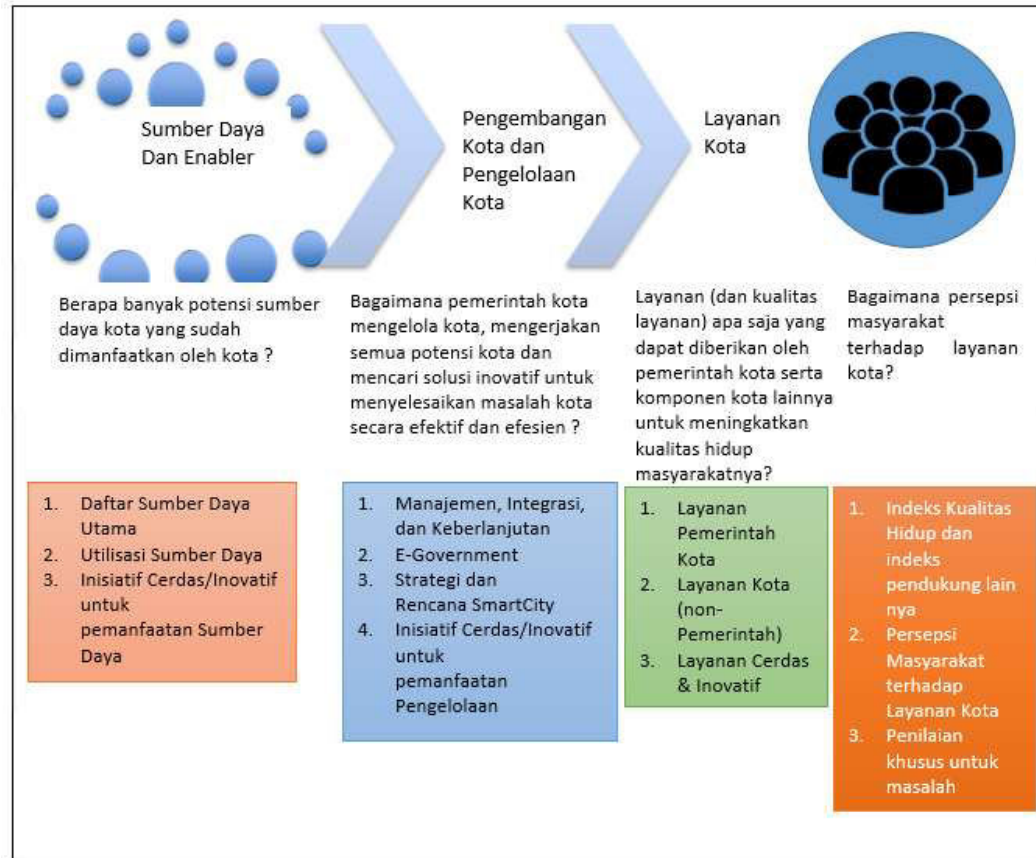
Terdapat dua indikator utama dalam mengukur kota cerdas , yakni indikator kualitas hidup dan indikator tingkat kematangan pengembangan kota cerdas. Indikator kualitas hidup akan mengukur hasil akhir dari berbagai upaya yang diharapkan yang pada akhirnya seluruh masyarakat cirebon akan meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan indikator yang kedua adalah akan mengukur sejauh mana tingkat kematangan kota cirebon baik pemerintah kotanya dan stakeholdernya secara efektif, efesien, terintegrasi, berkelanjutan dan terukur untuk menghasilkan layanan-layanan yang dapat meningkatkann kualitas hidup masyarakatnya.

Model pengukuran sebagai kota yang dinyatakan Smartcity dapat digambarkan seperti dibawah ini:



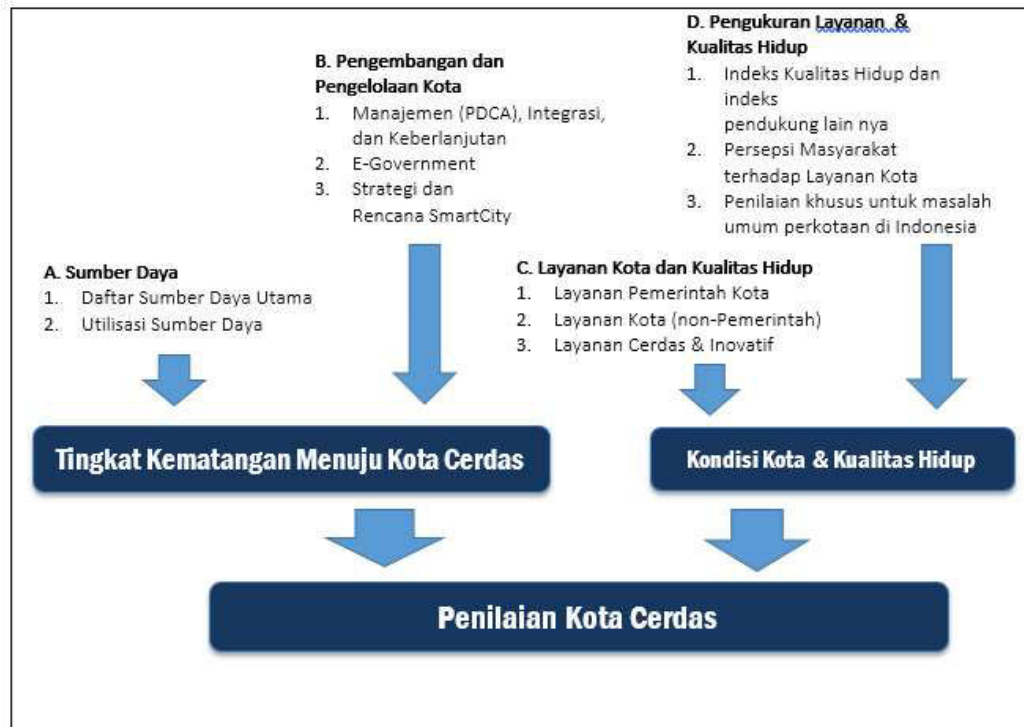
Gambar 1 5 Model pengukuran

Setelah ditetapkan model pengukuran sebagai kota cerdas, selanjutnya akan dirumuskan tentang indikator pengukuran smart city seperti skema dibawah ini :



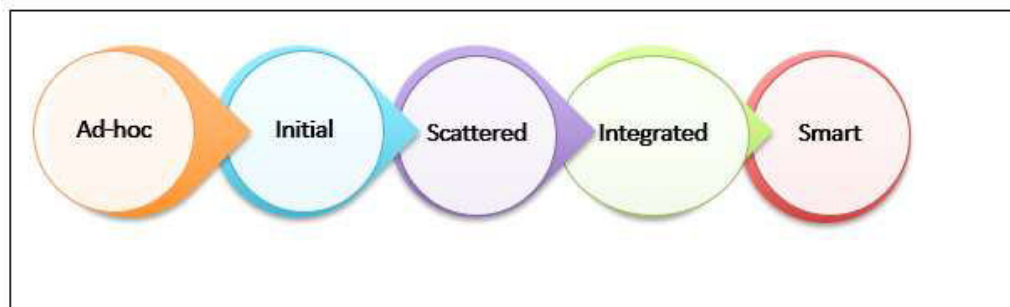
Gambar 1 6 Model pengukuran

Proses selanjutnya adalah penilaian smartcity terhadap indikator pengukuran yang telah ditetapkan , dengan demikian tahapan penilaian dapat dilihat dari seperti skema dibawah ini :



Gambar 1 7 Model pengukuran

Kematangan Cirebon sebagai kota cerdas akan dilihat dari beberapa indikator pengukuran tingkat kematangan yang dinyatakan dalam pernyataan atau tingkat kematangan (maturity level) seperti dibawah ini :



Gambar 1 8 Model pengukuran

Tabel 16 Referensi Tingkat Kematangan Smart City

Level	Tingkat Kematangan	Penjelasan
1	Ad-hoc	Belum ada inisiatif Smartcity
2	Initial	Sudah mulai ada inisiatif formal Smartcity yang tercantum dalam rencana formal kota, dilakukan oleh pemerintah kota
3	Scattered	Pemerintah kota mengajak berbagai pihak di dalam kota untuk melakukan berbagai inisiatif SmartCity, tetapi inisiatif-inisiatif tersebut tidak dijamin terintegrasi satu sama lain (mungkin belum ada forum resmi untuk koordinasi dan belum tentu ada rencana formal Smart City)
4	Integrated	Pemerintah kota mengajak berbagai pihak di dalam kota untuk melakukan berbagai inisiatif SmartCity yang terintegrasi, didukung oleh forum resmi (mis: Dewan Smart City) yang melibatkan seluruh komponen kota, dan menyepakati Rencana (formal) pengembangan Smart City yang memperlihatkan rencana yang terintegrasi
5	Smart	Kota yang sudah mencapai kondisi "Integrated" dan melakukan pengukuran kinerja pencapaian target serta melakukan improvement program-program SmartCity.

BAB VI

Penutup

Demikian penyusunan Buku Master Plan Cirebon Smart City ini kami susun. Dokumen ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pembangunan/pengembangan Smart City di Kota Cirebon yang akan dilaksanakan oleh setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon sesuai dengan tugas dan fungsinya, melalui kreativitas, inovatif, sinergis dan berkesinambungan serta dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dokumen Master Plan ini diharapkan dapat ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota Cirebon dan dapat di evaluasi secara bersama-sama sekurang-kurangnya dalam setiap 2 (dua) tahun pelaksanaan.



Lampiran



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.262-DKIS/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

WALI KOTA CIREBON,

Menimbang : bahwa untuk memanfaatkan teknologi informasi, Pemerintah Daerah Kota Cirebon akan melaksanakan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*), dimana untuk persiapan dan pelaksanaannya perlu dibentuk Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

5. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;

6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;

9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

12. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555/Kep.136-DISHUBINKOM/2010 tentang Penetapan Situs Web Resmi Pemerintah Kota Cirebon;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas pokok Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini adalah:
- mengarahkan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - Memantau pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - mengendalikan seluruh proses yang berkaitan dengan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - melaksanakan koordinasi dalam pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) dengan Perangkat Daerah terkait; dan
 - menyampaikan laporan kegiatan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta kepada Wali kota Cirebon melalui Sekretaris Daerah Kota Cirebon.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Juni 2017

WALI KOTA CIREBON,



The official stamp of the Wali Kota Cirebon is circular, featuring the Garuda Pancasila emblem in the center. The words "WALI KOTA" are written in a semi-circle at the top, and "CIREBON" is at the bottom. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the signature, the name "NASRUDIN AZIS" is printed.

NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.262-DKIS/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS
(SMART CITY)

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS (SMART CITY)

- I. Pembina : Wali Kota Cirebon
- II. Pengarah : 1. Danrem 063/SGJ
2. Ketua DPRD Kota Cirebon
3. Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon
5. Kapolres Cirebon Kota
6. Dandim 0614/Kota Cirebon
7. Dandenpom III/3 Cirebon
8. Danlanal III Cirebon
9. Kaden-C Pelopor Polda Jabar
10. Danyon Arhanud-14
11. Dirpolair Polda Jabar
12. Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan
13. Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik
14. Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan
- III. Ketua : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
- IV. Wakil Ketua I : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- V. Wakil Ketua II : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
- VI. Wakil Ketua III : Inspektur Daerah Kota Cirebon
- VII. Wakil Ketua IV : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
- VIII. Sekretaris I : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- IX. Sekretaris II : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
- X. Anggota 1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon

3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon
4. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon
6. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon
8. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon
9. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon
10. Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
12. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon
13. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon
14. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon
15. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
16. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
17. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon
19. Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon
20. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kota Cirebon
21. Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon
22. Ketua KADIN Kota Cirebon
23. Rektor UNSWAGATI Kota Cirebon
24. Rektor UNTAG Cirebon
25. Ketua STAIN Kota Cirebon
26. Ketua STMIK IKMI Kota Cirebon
27. Ketua STMIK CIC Kota Cirebon
28. Ketua STMIK WIT Kota Cirebon
29. Ketua STTC Kota Cirebon
30. Ketua Asosiasi PHRI Kota Cirebon
31. Pimpinan Perwakilan Bank Indonesia Cirebon
32. Pimpinan Bank Jabar Banten Cabang Cirebon
33. Pimpinan PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cirebon (TELKOM)
34. Pimpinan PT. Telekomunikasi Selular Cabang Cirebon (TELKOMSEL)

35. Pimpinan PT. Indosat, Tbk Cabang Cirebon
36. Pimpinan PT. XL Axiata, Tbk Cabang Cirebon
37. Pimpinan PT. Hutchison 3 Indonesia Cabang Cirebon (THREE)
38. Pimpinan PT. Smartfren Telecom, Tbk Cabang Cirebon
39. Pimpinan PT. Supra Primatama Nusantara Cabang Cirebon (BIZNET)
40. Pimpinan PT. Bina Informatika Solusi (BITSNET)
41. Pimpinan PT. Mega Mentari Mandiri
42. Pimpinan PT. Pelindo II Cabang Cirebon
43. Pimpinan PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon
44. Pimpinan PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon
45. Pimpinan PT. Multipratama Indahraya (GRAGE)
46. Pimpinan PT. Karya Bersama Takarob (CSB Mall)
47. Pimpinan PT. Wahana Multi Media Cirebon (Radar Cirebon)
48. Pimpinan PT. Berkah Pikiran Rakyat (Kabar Cirebon)
49. Ketua Relawan TIK Cabang Kota Cirebon

WALI KOTA CIREBON,



NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.262-DKIS/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN DEWAN CIREBON KOTA CERDAS
(SMART CITY)

URAIAN TUGAS DEWAN CIREBON KOTA CERDAS (SMART CITY)

1. Pembina :
melakukan pembinaan dan pengawasan secara umum terhadap kelancaran pelaksanaan kegiatan.
2. Pengarah :
 - a. mengarahkan persiapan dan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - f. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*); dan
 - h. menentukan kebijakan teknis yang perlu di aplikasikan oleh Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*).
3. Ketua :
 - a. mengarahkan pelaksanaan koordinasi Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. mengoordinasikan penyusunan dan menetapkan rencana dan program kerja masing-masing bidang;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. memberikan petunjuk, arahan, informasi, saran serta pertimbangan dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - f. mengoordinasikan dan memberikan petunjuk berkenaan permasalahan dalam pelaksanaan penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);

- g. melakukan koordinasi dengan asosiasi dan lembaga lain yang terkait dalam Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - h. memimpin rapat-rapat Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - i. menentukan kebijakan teknis yang perlu diaplikasikan oleh Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*); dan
 - j. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*).
4. Wakil Ketua I :
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan rencana program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - g. membantu Ketua dalam mempersiapkan administrasi untuk pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.
5. Wakil Ketua II :
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan rencana penganggaran dalam rangka pembiayaan pelaksanaan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang berkenaan dengan pelaksanaan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.
6. Wakil Ketua III :
- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. merumuskan pelaksanaan kebijakan pengawasan, pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - d. merumuskan dan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);

- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

7. Wakil Ketua IV :

- a. membantu Ketua dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- b. membantu Ketua dalam persiapan dan pelaksanaan tugas Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. merumuskan pelaksanaan teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- d. merumuskan dan pemberian alternatif pemecahan masalah berkenaan dengan pelaksanaan pengawasan Pengendalian Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. mewakili Ketua apabila berhalangan hadir; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua.

8. Sekretaris :

- a. mempersiapkan dan menyusun rencana dan program kerja kesekretariatan sesuai dengan lingkup tugasnya berdasarkan kebijakan dan arahan dari Ketua;
- b. merumuskan bahan/format yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- c. memimpin pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
- d. mempersiapkan bahan-bahan kebutuhan rapat Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- e. menyusun jadwal kegiatan dan notulensi rapat-rapat Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- f. memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan Dewan Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
- g. mempersiapkan dan menyusun laporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.

9. Anggota:

- a. membantu pelaksanaan tugas dengan tugas pokok dan fungsinya;
- b. membantu pelaksanaan kegiatan kesekretariatan lainnya untuk mendukung kegiatan dan tugas koordinator masing-masing; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Koordinator masing-masing.

WALIKOTA CIREBON,

NASRUDIN AZIS



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.263-DKIS/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA
CIREBON KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa Kota Cerdas (*Smart City*) merupakan pengembangan dan pengelolaan kota dengan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk mengetahui, memahami, dan mengendalikan berbagai sumber daya yang ada di dalam kota dengan lebih efektif dan efisien untuk memaksimalkan pelayanan kepada warganya serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka implementasi "Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*)" diperlukan peran serta pemerintah sebagai katalisator dan regulator serta difusi tata kelola *E-Government* ke dalam konsep Kota Cerdas (*Smart City*);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta dalam rangka pembangunan Kota Cerdas (*Smart City*) di Kota Cirebon, maka perlu dibentuk Tim Pelaksana Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Cirebon;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika;

8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon;
10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon Tahun 2013-2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Menengah Daerah Kota Cirebon Tahun 2013-2018;
11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon;
13. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon;
14. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon;
17. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 555.05/Kep.262-DKIS/2017 tentang Pembentukan Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Cirebon dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika tentang Kerjasama Implementasi Gerakan Menuju 100 *Smart City* Kota Cirebon Nomor 120.23/KB.8-Adm.Pemum/2107 Tanggal 22 Mei 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tugas pokok Tim Pelaksana Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan Wali Kota ini adalah :
- a. bersama dengan Dewan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) menyusun Rencana Induk Pengembangan Cirebon Smart City;
 - b. menyusun draft evaluasi pencapaian implementasi Rencana Pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*) dari sisi Pemerintah sesuai sektornya;
 - c. menyusun draft hasil analisis dan rekomendasi-rekomendasi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik di waktu yang akan datang;
 - d. mendorong dan mengarahkan Perangkat Daerah untuk melaksanakan konsep pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*);
 - e. melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*); dan
 - f. membuat langkah inovatif dan kreatif demi terciptanya keberlanjutan pengembangan Cirebon Kota Cerdas (*Smart City*).
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 16 Juni 2017

WALI KOTA CIREBON,


NASRUDIN AZIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 555.05/Kep.263-DKIS/2017
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA CIREBON KOTA
CERDAS (*SMART CITY*)

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA
CIREBON KOTA CERDAS (*SMART CITY*)

- I. Pembina : Wali Kota Cirebon
- II. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Cirebon
- III. Pengarah :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 - 3. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon
- IV. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
- V. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- VI. Sekretaris I : Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
- VII. Sekretaris II : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
- VIII. Kelompok Kerja (POKJA) Kota Cerdas (*SMART CITY*) :
 - 1. *Smart Governance* :
 - Koordinator : Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon
 - Anggota :
 - 1. Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
 - 2. Kepala Bidang Penganggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon

3. Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
5. Kepala Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
6. Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon
7. Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

2. *Smart Branding* :

Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
3. Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon
5. Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon
6. Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon
7. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
8. Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pengendalian Penduduk pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon

9. Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

3. *Smart Economy* :

Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon
3. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah I pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah II pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
5. Kepala Bidang Statistik Sektor dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
6. Kepala Sub Bagian Penanaman Modal, Kebudayaan dan Kepariwisata pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon
7. Kepala Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektor Bidang Statistik Sektor dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

4. *Smart Living* :

Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Anggota :

1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
3. Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon
5. Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon

6. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
7. Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon
8. Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon
9. Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan pada Bagian Adminitrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon
10. Kepala Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektorl Bidang Statistik Sektorl Dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

5. *Smart Society* :

Koordinator : Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Anggota :

1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon
3. Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon
5. Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon
6. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon
7. Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon
8. Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

6. *Smart Environment* :

Koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon

Anggota : 1. Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon
2. Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon
3. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
4. Kepala Bidang Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon
5. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon
6. Kepala Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon
7. Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

IX. Unsur Penunjang :

1. Tim Tata Kelola *Smart City* :

Koordinator : Kepala Seksi Tata Kelola *E-Government* Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

Anggota : 1. Imbang Isnaeni, SSTP (Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Budaya Kerja pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon)
2. Monang M.T. Situmorang, SSTP (Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon)
3. Rd. Yuki Maulana Hidayat, SSTP (Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon)
4. Yadi Supriyadi, SH, MH (Kepala Sub Bagian Fasilitas Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah)

5. Moh. Riswanto, SH (Sub Bidang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Data Aparatur Sipil Negara Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon)
6. Muhammad Luthfy Iqbal, SE, M.Si (Kepala Sub Bagian Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon)
7. Deden Ady Priyono, ST, MM (Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)
8. Lia Rosmalia, ST, M.Ec.Dev (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)
9. Abdul Rahim, S.Kom (Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)
10. Mohamad Soleh, SH (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
11. Helmy Bawono Putro, SH (Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon)

2. Tim Infrastruktur dan Teknologi Informasi *Smart City* :

Koordinator : Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

- Anggota :
1. Akhmad Amin, S.Sos, MM (Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
 2. Ganis Hermawan, SH (Kepala Seksi Keamanan Informasi *E-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
 3. Agus Riswandy, SE (Kepala Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
 4. Luqman Mubaroq, ST (Fungsional Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon)

5. Halim Limansah, ST (Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kota Cirebon)
6. Herry Chandra Wibawa, SH (Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon)
7. Adi Darusman, S.Kom (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon)
8. Indra Gunawan, ST (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
9. Sumarno, SE (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
10. Yuddy Dewantara (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)

3. Tim Pengelola Layanan *Smart City* :

Koordinator : Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem *E-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

Anggota : 1. Andi Wibowo, S.Sos, M.Si (Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)

2. Catur Wulan Anggraeni, S.IP (Kepala Seksi Hubungan Media Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)

3. Raden Harum Rohgunanto, SKM, M.Eng. (Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)

4. Mohammad Iqbal, SH, MSi (Kepala Seksi Konsultasi, Inovasi dan Pengaduan Layanan Bidang Data, Informasi Dan Pengaduan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon)

5. Ade Sastrawijaya, S.Pd.,M.Pd. (Kepala UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)

6. Sisca Octasari, ST, M.Si. (Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)

7. Adam Wallesa, SSTP, Msi (Lurah Kecapi)
8. Hj. Novie Devyani Kirana, SE (Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)
9. Arif Wibawa Rukmana, S.Kep., MPH. (Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon)
10. Sri Rahayu, S.KOM, MM (Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)

4. Tim Pengembangan Aplikasi *Smart City* :

Koordinator : Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan *E-Government* pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon

- Anggota :
1. Sutiono, ST (Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
 2. Lolok Tiviyanto, SE, M.Si (Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)
 3. Fajar Farhani, ST (Kepala Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah Bidang Penganggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)
 4. Jarot Sugiri Parwito, ST (Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)
 5. Muhammad Izzuddin, S.Kom (Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon)
 6. Fauzi Fahmi, S. Kom (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)
 7. Rina Oktiviana, S.KOM (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)
 8. Hery Suherman, SE (Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)

9. Andre Ginanjar Ferdhiansyah Pratama, ST
(Pelaksana pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik Kota Cirebon)
10. Kasrim, AMd. Kep (Pelaksana pada Dinas
Kesehatan Kota Cirebon)

WALI KOTA CIREBON,



NASRUDIN AZIS



CIREBON LENKO

LAYANAN ELEKTRONIK KESEHATAN ONLINE

WHY

1. Kesehatan merupakan Pelayanan Dasar
2. Penumpukan pasien di Gedung Rawat Jalan
3. Waktu tunggu Pendaftaran yang cukup lama sehingga kepastian waktu tidak tercapai

WHAT

Sistem pelayanan antrian Online berbasis Android & Informasi berbasis Android ketersediaan Ruang rawat inap di RSD Gunung Jati

WHO

- RSD Gunung Jati
- Dinas Kesehatan (Puskesmas)
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- BPJS

HOW

UMUM

Meningkatkan pelayanan dasar, mempersingkat waktu tunggu, dan mengatur antrian pasien melalui pengembangan aplikasi layanan pendaftaran online RSD Gunung Jati, serta mengintegrasikan data dari SIM RS dan BPJS untuk memperoleh informasi antrian, dimulai di RSD Gunung Jati yang kemudian dapat dikembangkan ke RS lainnya.

SUPRASTRUKTUR (KEBIJAKAN DAN PERATURAN)

Kebijakan yang dibutuhkan dan bersifat operasional :

1. Penyusunan SOP Cirebon Lengko (pelayanan antrian online di RSD Gunung Jati)
2. Penerapan SMKTI (Standar Manajemen Keamanan Informasi) / ISO:270001

INFRASTRUKTUR (PERANGKAT DAN APLIKASI)

Perangkat dan Aplikasi yang harus disiapkan :

1. Display antrian per Poli Klinik
2. Sistem Audio yang terintegrasi
3. Upgrade Bandwidth Internet untuk Aplikasi (Up to 50mbps)
4. Upgrade Bandwidth VPN ke Server BPJS
5. Penambahan Mesin Check In dan Pendaftaran (harus 10 mesin)
6. Manajemen dan revitalisasi Jaringan dan Server RSD Gunung Jati
7. Aplikasi berbasis mobile dan web
8. Aplikasi pendaftaran via SMS
9. Aplikasi rujukan balik ke sarana kesehatan dasar

SUMBER DAYA MANUSIA (APARATUR DAN MASYARAKAT)

Peningkatan sumber daya manusia:

1. Penyediaan helpdesk di lokasi pendaftaran/check in
2. Peningkatan kapasitas aparatur penyelenggara layanan
3. Optimalisasi publikasi layanan kepada masyarakat

WHEN

November Tahun 2017 (Sistem pelayanan antrian online berbasis android) – Di Launching pada 31 Agustus 2017



WADUL BAE

WARGA PEDULI BOCAH LAN EMBOKE

WHY

Menyelaraskan dengan gagasan nasional, Undang Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

WHAT

Konsep penanganan terpadu kekerasan terhadap anak dan perempuan

WHO

- Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Cirebon
- Bapas Kelas I Cirebon
- Unit PPA Sat Reskrim Polres Cirebon Kota
- Dinas Kesehatan Kota Cirebon
- Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) RSUD Gn. Jati Kota Cirebon
- LSM Wadul Bae
- Kader masyarakat
- Kader pelajar

HOW

UMUM

Mengembangkan sistem penanganan terpadu kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terintegrasi, Mengembangkan sistem pelaporan bagi masyarakat / Kader / Pelopor dan Pelapor.

SUPRASTRUKTUR (KEBIJAKAN DAN PERATURAN)

Kebijakan dalam bentuk produk hukum atau perundangan diantaranya :

1. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.06. PR . 07.03 Tahun 2007 tanggal 23 pebruari 2007, maka wilayah kerja Balai Pemasyarakatan Klas I Cirebon menjadi 5 Kabupaten dan Kota, yaitu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Kuningan dan Kabupaten Indramayu.
2. Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 463,05/Kep.88-DSPPPA/2017 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon 2017 – 2022.

INFRASTRUKTUR

Sudah memiliki beberapa fasilitas yang terintegrasi dengan Instansi Induk :

1. Rumah Aman – DSPPPA dan P2TP2A
2. PPT – RSUD Gn Jati
3. PPA – Polres Cirebon Kota
4. BAPAS – Kementerian Kehakiman
5. Masyarakat melalui Kader-Kadernya
6. Pelajar yang dijadikan Duta Pelopor dan Pelapor Tindak kekerasan pada Anak.

STRUKTUR

Program ini dilaksanakan lintas sektoral dan instansi serta keterlibatan masyarakat dan pelajar. Pengembangan yang dapat dilakukan adalah menyediakan sarana pelaporan dari masyarakat yang terintegrasi. Saat ini sudah ada LAPOR dan 112, yang perlu ditindaklanjuti dengan sosialisasi kepada seluruh unsur yang terlibat dalam program ini khususnya kepada masyarakat.

WHEN

Sudah Berjalan sejak 2003 s.d sekarang



CIREBON BROJOL AJA KLALEN

AKTE KELAHIRAN LANGSUNG JADI KALAU LAPORAN SECARA ONLEN

WHY

Pelayanan akte kelahiran per hari > 50 & Proses penerbitan akta kelahiran pada saat ini sangat rumit karena harus melampirkan dokumen kependudukan lainnya sehingga proses penerbitan akte kelahiran menjadi lama.

WHAT

Dokumen kependudukan akte kelahiran dan kartu keluarga dalam satu pelayanan dan mempersingkat proses menjadi 2 hari dari sebelumnya 14 hari

WHO

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- RSB Cahaya Bunda

HOW

UMUM

Sudah ada aplikasi yang mendukung pendaftaran online yang sampai saat ini baru dapat diakses oleh operator kecamatan. Sehingga tinggal membuat aplikasi kecil yang berfungsi pendaftaran yang langsung terkoneksi ke sistem yang ada di Disdukcapil.

SUPRASTRUKTUR (KEBIJAKAN DAN PERATURAN)

1. Perubahan perwal tentang pendaftaran akta kelahiran
2. Pembuatan SOP pendaftaran akta kelahiran
3. Sosialisasi ke masyarakat dan pihak-pihak terkait

INFRASTRUKTUR

Kesiapan Infrastruktur fisik:

1. 2 server, koneksi internet, 5 kecamatan
2. TIK: aplikasi masih tahap analisis kebutuhan pengguna dan bisnis proses
3. Perlu menerapkan keamanan informasi baik aplikasi dan jaringan'
4. Sosial: belum adanya sosialisasi

STRUKTUR

1. Kesiapan SDM: 1 administrator sistem (non pns), 3 operator (2 non pns, 1 pns), 5 operator kecamatan
2. Birokrasi: belum adanya SOP pendaftaran online
3. Anggaran: belum dianggarkan

WHEN

Bulan November 2017



CIREBON MELET

MELEK INTERNET

WHY

Tren penggunaan Smartphone yang semakin meluas sehingga Pengguna internet di Kota Cirebon semakin meningkat akan tetapi biaya akses internet masih dianggap mahal oleh masyarakat Kota Cirebon.

WHAT

Penyediaan wifi gratis di beberapa tempat. Dan kedepannya bisa tersebar di area-area publik, sarana pendidikan dan bapermas-bapermas

WHO

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
- Para Provider Telekomunikasi dan Internet

HOW

UMUM

Setiap Penyedia Internet (ISP) dan Provider Telekomunikasi di Kota Cirebon dapat berkontribusi melalui CSR & Pemasangan free hot spot.

SUPRASTRUKTUR (KEBIJAKAN DAN PERATURAN)

1. Perlunya kebijakan mengenai CSR terutama penyediaan Wifi Publik
2. Pelaksanaan di beberapa titik area publik (taman, shelter PKL, Alun2, ruang publik terbuka ramah anak, Bappermas)

INFRASTRUKTUR

1. Belum meratanya infrastruktur IT
2. Kemajuan IT yang sudah tidak bisa di bendung
3. Sosialisasi INSAN (internet sehat dan Aman) dan INCAKAP (internet cerdas, kreatif dan Produktif) kepada masyarakat

STRUKTUR

1. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah Kota Cirebon. Sehingga perlu penambahan anggaran untuk penyediaan di wilayah perkantoran.
2. Mendorong pihak swasta untuk menyediakan Free Wifi melalui CSR
3. Perlunya Pendataan Pihak Swasta yg akan berkontribusi.


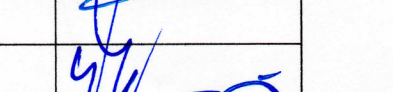
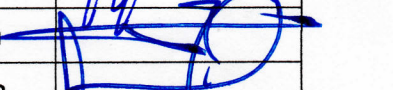
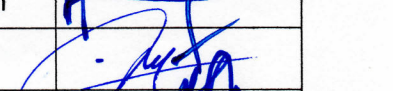

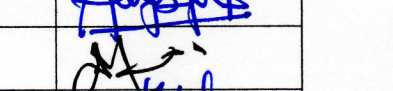
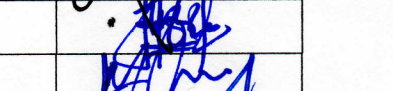
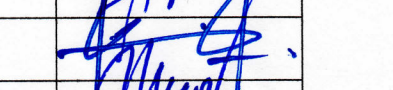
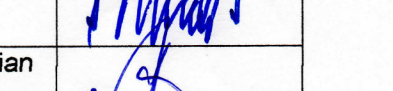
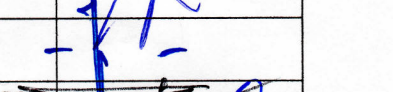
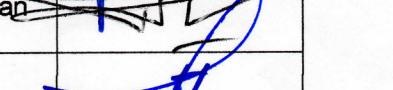
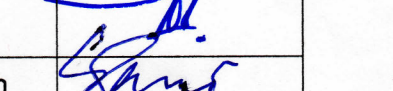
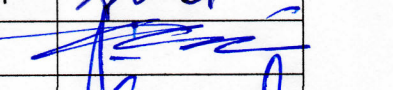
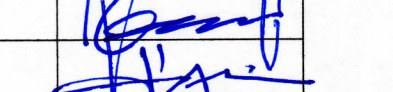
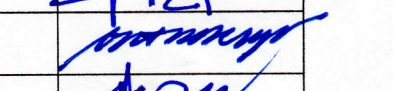
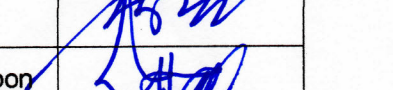
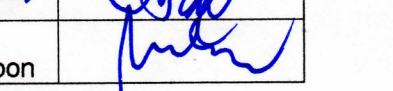

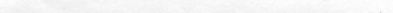
WHEN

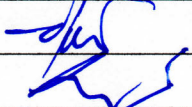
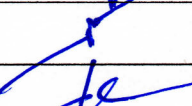
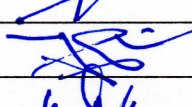
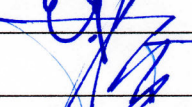
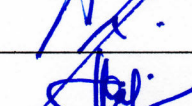
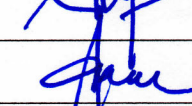

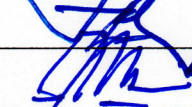
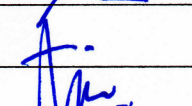
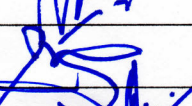
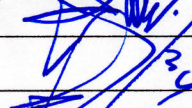
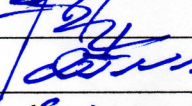
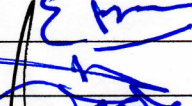
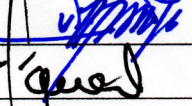
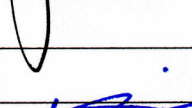
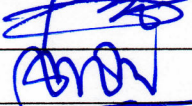

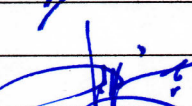
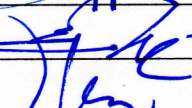
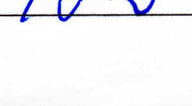

Dimulai september 2017 dan terus berkelanjutan


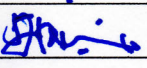
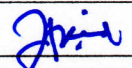
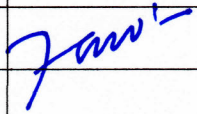
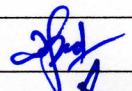
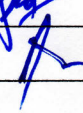
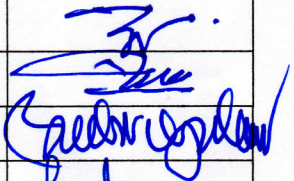
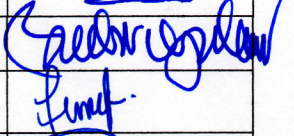
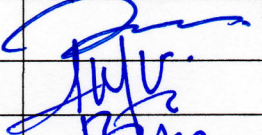
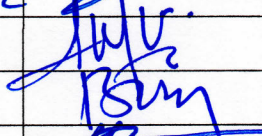
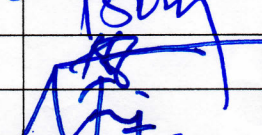
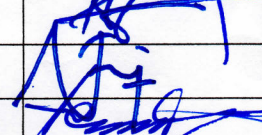
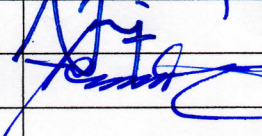
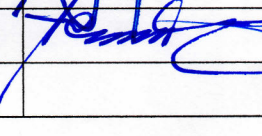
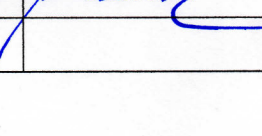
**KOMITMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SMART CITY
PEMERINTAH KOTA CIREBON
DAN DEWANS SMART CITY KOTA CIREBON**

Dengan rahmat Allah yang maha kuasa, dengan ini kami menyatakan komitmen untuk melaksanakan pembangunan Smart City di Kota Cirebon, sebagaimana yang tertuang dalam buku I, II, dan III Master Plan Smart City Kota Cirebon, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segenap masyarakat di Kota Cirebon

Semoga Allah SWT merestui segala upaya ini.


NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
1.	Drs. NASRUDIN AZIS, SH	Wali Kota Cirebon	
2.	Kolonel (Inf) VERI SUDIJANTO S	Danrem 063/SGJ	
3.	EDI SURIPNO, S.IP, M.Si	Ketua DPRD Kota Cirebon	
4.	SUHARNO, SH, MH	Ketua Pengadilan Negeri Kota Cirebon	
5.	ARIFIN HAMID, SH, MH	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Cirebon	
6.	AKBP. ADI VIVID AGUSTIADI BACHTIAR, S.IK, M.Hum, M.S.M	Kapolres Cirebon Kota	
7.	Letkol (Inf) HERI RUSTANTO, S.Sos	Dandim 0614/Kota Cirebon	
8.	Letkol (Mar) YUSTINUS RUDIMAN, M. TR. Hania, M. TR, Han.	Danlanal III Cirebon	
9.	Letkol (CPM) YUDO PRAMONO, SE., SH	Dandenpom III/3 Cirebon	
10.	AKBP. WIDODO, SE, MM.	Kaden-C Pelopor Polda Jabar	
11.	Letkol (Arh) ADHI KURNIAWAN, SE	Danyon Arhanudse -14	
12.	Kombes. (Pol) H. SUWARTO, SH, MH.	Dirpolair Polda Jabar	
13.	Drs. ASEP DEDI, M.Si.	Sekretaris Daerah Kota Cirebon	
14.	R.HENDA SH, MH	Staf Ahli Wali Kota Bidang Perekonomian dan Pembangunan	
15.	Drs. ABIDIN	Staf Ahli Wali Kota Bidang Hukum dan Politik	
16.	Drs. H. HAYAT M.Si	Staf Ahli Wali Kota Bidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan	
17.	MOHAMMAD ARIF KURNIAWAN, ST.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
18.	H. SUKIRMAN, SE, MM.	Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	
19.	H. EKA SAMBUDJO, Bc.Ak S.Sos.	Inspektur Daerah Kota Cirebon	
20.	Drs. SUTISNA, MSi.	Sekretaris DPRD Kota Cirebon	
21.	IING DAIMAN, S.Ip, M.Si.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
22.	Ir. BUDI RAHARDJO, MBA.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon	
23.	Ir. EDDY KRISNOWANTO, MM.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon	
24.	Drs. H. ATANG HASAN DAHLAN, M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
25.	Ir. YATI ROHAYATI	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
26.	Drs. H. JAJA SULAEMAN, M.Pd.	Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon	
27.	dr. H. EDY SUGIARTO, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon	
28.	Drs. ANDI ARMAWAN	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon	
29.	Drs. ADAM NURIDIN, MM.	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Cirebon	
30.	Ali yusuf A	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon	
31.	drh. MAHARANI DEWI	Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Kota Cirebon	
32.	Drs. H. RM. ABDULLAH SYUKUR, M.Si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	
33.	SANUSI, S.Sos.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon	
34.	H. JAMALUDIN, S.Sos.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon	
35.	Dra. DEANE DEWI RATIH, MM.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon	
36.	Drs. SUMANTO	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	
37.	Drs. DANA KARTIMAN	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon	
38.	Drs. H. MOCHAMAD KORNELI, M.Si.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
39.	H. ANWAR SANUSI, S.Pd, M.Si.	Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon	
40.	Ir. AGUNG SEDIJONO, M.Si.	Kepala Kantor Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon	
41.	DALHARI, SH.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dalam Negeri Kota Cirebon	
42.	Drs. AGUS SUHERMAN, SH, MH.	Camat Harjamukti	
43.	SUBRATA, S.Sos, MM.	Camat Kesambi	
44.	Drs. KUSNI	Camat Lemahwungkuk	
45.	Drs. UYUNG HERU UTOMO	Camat Kejaksan	
46.	EDI SISWOYO, SAP.	Camat Pekalipan	
47.	Muhammad Lutfi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon	
48.	H. Yuyun Wahyu Kurnia	KADIN Kota Cirebon	
49.	Djohan R. Wiradinata	UNSWAGATI Kota Cirebon	
50.		UNTAG Cirebon	
51.		STAIN Kota Cirebon	
52.	Dian Ale Kurnia, M.Kom	STMIK IKMI Kota Cirebon	
53.	Amroni	STMIK CIC Kota Cirebon	
54.	Harigati, M.Kom	STMIK WIT Kota Cirebon	
55.	IWAN PURNAMA	STTC Kota Cirebon	
56.		Asosiasi PHRI Kota Cirebon	
57.	Maya Indriatika	Bank Indonesia Cirebon	
58.	WAWAN WARDAYA	Bank Jabar Banten Cabang Cirebon	
59.	TEGUH URWANDI	PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk Cirebon (TELKOM)	

NO	NAMA	INSTANSI	TANDA TANGAN
60.	Muharlis	PT. Telekomunikasi Selular Cabang Cirebon (TELKOMSEL)	
61.		PT. Indosat, Tbk Cabang Cirebon	
62.	ATSP 	PT. XL Axiata, Tbk Cabang Cirebon	
63.		PT. Hutchison 3 Indonesia Cabang Cirebon (THREE)	
64.	RISKY FARENDA.	PT. Smartfren Telecom, Tbk Cabang Cirebon	
65.		PT. Supra Primatama Nusantara Cabang Cirebon (BIZNET)	
66.		PT. Bina Informatika Solusi (BITSNET)	
67.	HERRA TRILAKSANA	PT. Mega Mentari Mandiri	
68.	MANUHAHYA	PT. Pelindo II Cabang Cirebon	
69.		PT. Perusahaan Gas Negara Cirebon	
70.		PT. Perusahaan Listrik Negara Cabang Cirebon	
71.	TRISNADI DAREX	PT. Multipratama Indahraya (GRAGE)	
72.	BUDHI VIRMANSYAH	PT. Karya Bersama Takarob (CSB Mall)	
73.	Mike Dwi S	PT. Wahana Multi Media Cirebon (Radar Cirebon)	
74.	M. Rahmat	PT. Berkah Pikiran Rakyat (Kabar Cirebon)	
75.	M. arifin	Relawan TIK Cabang Kota Cirebon	
76.	Dr. Bunard.	RSUD Gunung Jati	
77.	Hasan. H	FAJAR CIREBON	
78.	MURUL FAKRI	RAKYAT CIREBON	
79.	AGUS SUPRIEND	KETUA RW 08 MERBABU ASIH	
80.			

Cirebon , 2 November 2017

Mengetahui,
WALI KOTA CIREBON

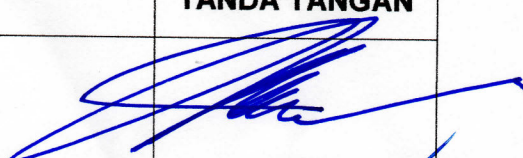

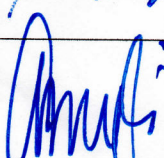
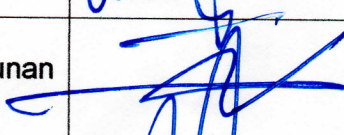
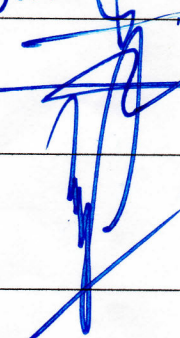
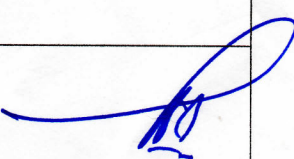

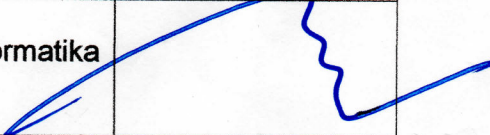

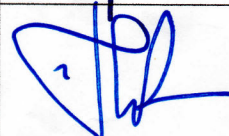



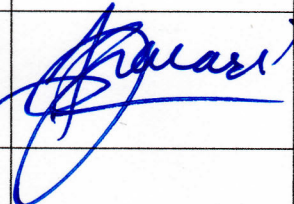
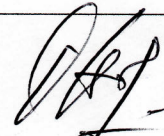


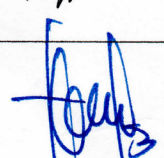
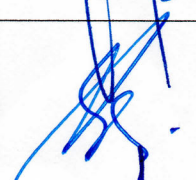
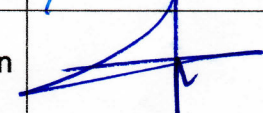
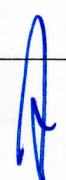
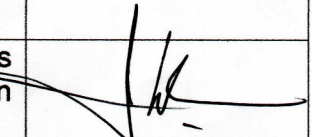
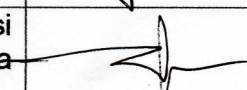
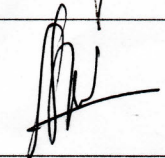
Drs. NASRUDIN AZIS, SH

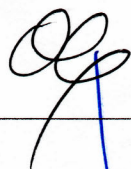
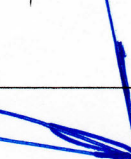
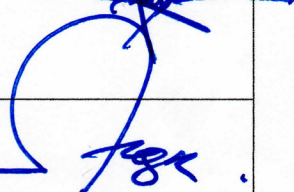
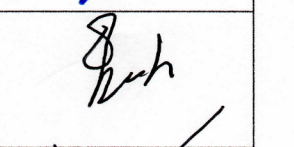
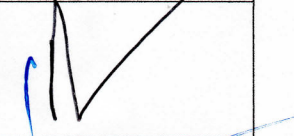
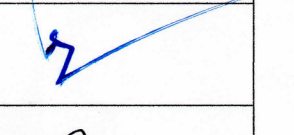
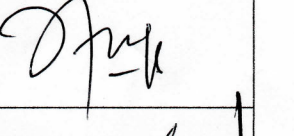

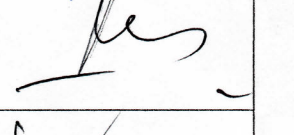

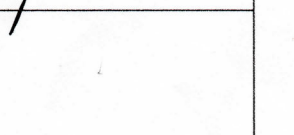
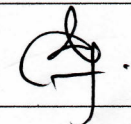
**KOMITMEN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN SMART CITY
PEMERINTAH KOTA CIREBON
DAN TIM PELAKSANA SMART CITY KOTA CIREBON**



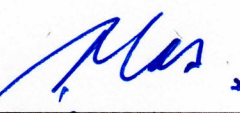
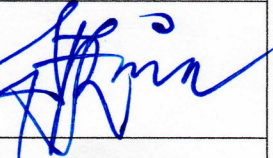

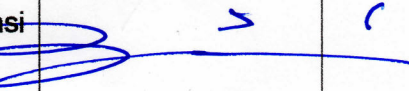



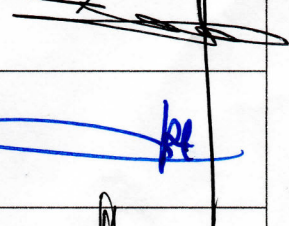
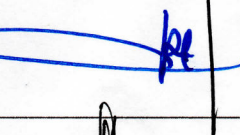

Dengan rahmat Allah yang maha kuasa, dengan ini kami menyatakan komitmen untuk melaksanakan pembangunan Smart City di Kota Cirebon, sebagaimana yang tertuang dalam buku I, II, dan III Master Plan Smart City Kota Cirebon, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan segenap masyarakat di Kota Cirebon


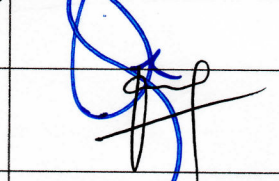
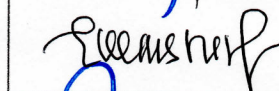
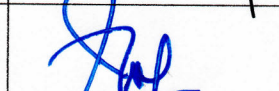
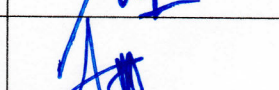

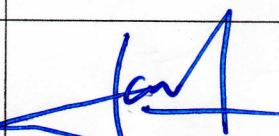

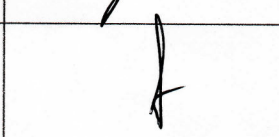
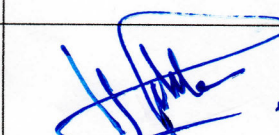
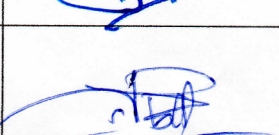
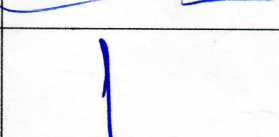
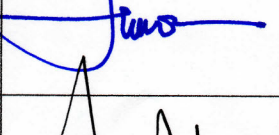
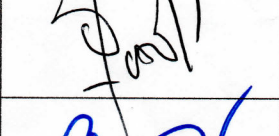
Semoga Allah SWT merestui segala upaya ini.

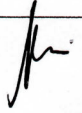

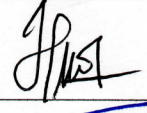
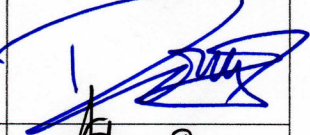
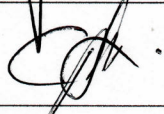


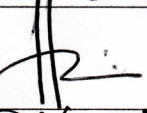
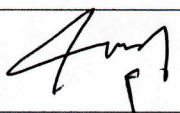

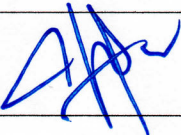

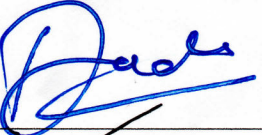

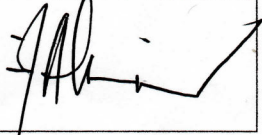
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Drs. Nasrudin Aziz, SH	Wali Kota Cirebon	
2.	Drs. Asep Dedi, M. Si	Sekretaris Daerah Kota Cirebon	
3.	Drs. Agus Mulyadi, M. Si	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
4.	Ir. Syon Indrayana, MT	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
5.	Ir. Vicky Sunarya	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
6.	Iing Daiman, S. Ip, M. Si	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
7.	M. Arif Kurniawan, ST.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
8.	MA'RUF NURYASA, AP	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
9.	Drs. Agus Herdhyana M. Si	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
10.		Kepala Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
11.		Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	

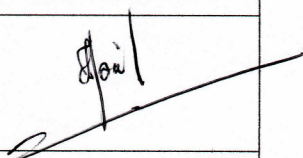
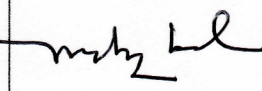
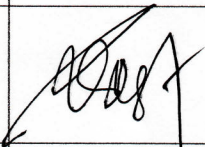


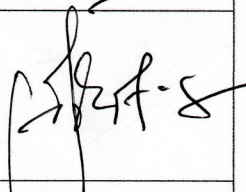
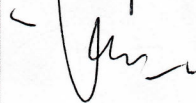
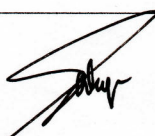


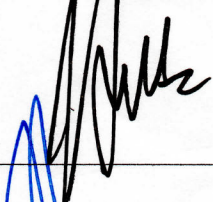
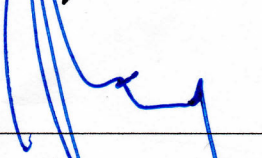

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
12.	H. Dede Sudarsono ST, M. Si	Kepala Bidang Penganggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	
13.	Fery Buanari	Kepala Bidang Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Karier pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon	
14.		Kepala Bidang Data, Informasi dan Pengaduan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	
15.	Judung Supudin	Kepala Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
16.	Calmyari	Kepala Sub Bagian Tata Laksana pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
17.	Lady Nuristina S.	Kepala Seksi Pengelolaan Opini Publik Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
18.	SOSYOMANTO	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
19.	Dede Achmad	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Perkotaan dan Inovasi Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
20.	Andi Azvi	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	
21.	ICIP Suryadi S. Sos. MM	Kepala Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon	
22.	SOLEH.M	Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon	
23.		Kepala Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon	
24.	ALIMULHILMI	Kepala Bidang Pariwisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon	
25.	Wawan S	Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
26.	Sari Testawa	Kepala Sub Bagian Administrasi dan Pengendalian Penduduk pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon	

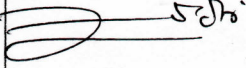




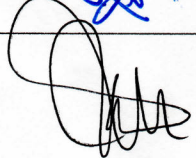
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
27.	Yoga Prumono	Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
28.	Jusro	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
29.	HARRY DAVID	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
30.	Aeng Rajudin	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Cirebon	
31.	Siti Solich	Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah I pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	
32.	MASTARA, SP. MSi	Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah II pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	
33.	Titi Helvina	Kepala Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
34.	Imas Nuchayah-SH	Kepala Sub Bagian Penanaman Modal, Kebudayaan dan Kepariwisata pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
35.	AYYUS-U	Kepala Seksi Analisis dan Kemitraan Statistik Sektoral Bidang Statistik Sektoral dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
36.	ITA ROSTA	Kepala Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
37.	Bojo	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan dan Kemasyarakatan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
38.		Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	
39.		Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Cirebon	
40.		Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon	
41.	dr. Dian Novitasari, MARS	Kepala Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
42.	ELon Rambe	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
43.	Ahaerul Zahhar	Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon	
44.	Alan Sulaeman	Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Cirebon	
43.	Herminis	Kepala Sub Bagian Pendidikan dan Kesehatan pada Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
44.	Rina. Risnawati	Kepala Seksi Pendataan dan Pengolahan Data Statistik Sektor Statistik Sektor Dan Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
45.	GRANDIA BIMA PRAMANA	An. Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
46.	Kawzan Wahyuni	Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Masyarakat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
47.		Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon	
48.	Smito	Kepala Bidang Penegakan Perundang-Undangan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cirebon	
49.	Hanigan	Kepala Bidang Perlindungan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon	
50.	Jede Anilia	Kepala Bidang Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Cirebon	
51.	Rajid Dianto	Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
52.	Siti Djulaeha	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
53.	Dra. Trihu Suprati	Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
54.		Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
55.	Starif Arifin	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon	
56.	Saib Sajaja	Kepala Bidang Akuntansi Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon	
57.	Eli Mangati	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	
58.	Hj. IMAS MASKANAH	Kepala Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kota Cirebon	
59.		Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Cirebon	
60.	Deden Ay. p	Kepala Sub Bagian Perencanaan Pembangunan, Pekerjaan Umum dan Perumahan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Cirebon	
61.		Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
62.	TM. Maulana Yusuf, S.Kom	Kepala Seksi Tata Kelola E-Government Bidang Layanan E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
63.	Imbang Isnaeni, SSTP	(Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Budaya Kerja pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon)	
64.	Monang M.T. Situmorang, SSTP	(Kepala Sub Bagian Pendayagunaan Aparatur pada Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kota Cirebon)	
65.	Rd. Yuki Maulana Hidayat, SSTP	(Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Kota Cirebon)	
66.	Yadi Supriyadi, SH, MH	(Kepala Sub Bagian Fasilitasi Produk Hukum Daerah pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah)	
67.	Moh. Riswanto, SH	(Sub Bidang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Data Aparatur Sipil Negara Bidang Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon)	
68.	Muhammad Luthfy Iqbal, SE, M.Si	(Kepala Sub Bagian Potensi Pendapatan Asli Daerah pada Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Cirebon)	
69.	DEDI FACHRUDIN, SE, M.Si	(Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Kominfo, Statistik dan Persandian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
70.	Lia Rosmalia, ST, M.Ec.Dev	(Pelaksana pada Inspektorat Kota Cirebon)	
71.	Abdul Rahim, S.Kom	(Pelaksana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)	
72.	Mohamad Soleh, SH	(Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
73.	Helmy Bawono Putro, SH	(Pelaksana pada Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah Kota Cirebon)	
74.	Raden Dony Santosa, S.Kom	Kepala Seksi Infrastruktur dan Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
75.	Akhmad Amin, S.Sos, MM	(Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
76.	Ganis Hermawan, SH	(Kepala Seksi Keamanan Informasi E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
77.	Agus Riswandy, SE	(Kepala Seksi Dukungan dan Layanan Operasional Persandian pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
78.	Luqman Mubaroq, ST	(Fungsional Barang dan Jasa pada Sekretariat Daerah Kota Cirebon)	
79.	Halim Limansah, ST	(Pelaksana pada Sekretariat DPRD Kota Cirebon)	
80.	Herry Chandra Wibawa, SH	(Pelaksana pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Cirebon)	
81.	Adi Darusman, S.Kom	(Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon)	
82.	Indra Gunawan, ST	(Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
83.	Sumarno, SE	(Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
84.	Yuddy Dewantara	(Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
85.	Dodi Solihudin, ST, MT	Kepala Seksi Pengembangan Ekosistem E-Government pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
86.	Andi Wibowo, S.Sos, M.Si	(Kepala Seksi Layanan Informasi Publik Bidang Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
87.	Catur Wulan Anggraeni, S.IP	(Kepala Seksi Hubungan Media Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	

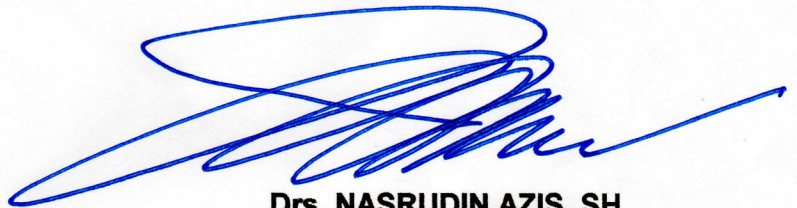
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
88.	Raden Harum Rohgunanto, SKM, M.Eng.	(Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)	
89.	Mohammad Iqbal, SH, MSi	(Kepala Seksi Konsultasi, Inovasi dan Pengaduan Layanan Bidang Data, Informasi Dan Pengaduan Layanan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon)	
90.	Ade Sastrawijaya, S.Pd.,M.Pd.	(Kepala UPT Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
91.	Sisca Octasari, ST, M.Si.	(Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Lingkungan Hidup, Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah)	
92.	Adam Wallesa, SSTP, Msi	Kepala Sub Bagian Tata Pemerintahan	
93.	Hj. Novie Devyani Kirana, SE	(Kepala Sub Bidang Perencanaan Urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon)	
94.	Arif Wibawa Rukmana, S.Kep., MPH	(Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon)	
95.	Sri Rahayu, S.KOM, MM	(Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)	
96.	lid Anwar Hidayat,S.Kom	Kepala Seksi Pengembangan Aplikasi Bidang Layanan <i>E-Government</i> pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon	
97.	Sutiono, ST	(Kepala Seksi Pengelolaan Data Dan Integrasi Sistem Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
98.	Lolok Tiviyanto, SE, M.Si	(Kepala Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon)	
99.	Fajar Farhani, ST	(Kepala Sub Bidang Penganggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah Bidang Penganggaran pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)	
100.	Jarot Sugiri Parwito, ST	(Kepala Sub Bagian Program dan Pelaporan pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
101.	Muhammad Izzuddin, S.Kom	(Kepala Seksi Kerjasama dan Inovasi Pelayanan Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon)	
102.	Fauzi Fahmi, S. Kom	(Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)	
103.	Rina Oktiviana, S.KOM	(Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)	
104.	Hery Suherman, SE	(Pelaksana pada Badan Keuangan Daerah Kota Cirebon)	
105.	Andre Ginanjar Ferdhiansyah Pratama, ST	(Pelaksana pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Cirebon)	
106.	Kasim, AMd. Kep	(Pelaksana pada Dinas Kesehatan Kota Cirebon)	

Cirebon , November 2017

Mengetahui,

WALI KOTA CIREBON



Drs. NASRUDIN AZIS, SH